

**ANALISIS PENENTUAN KECAMATAN PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

Oleh:

ANDI ARKAM

NIM. 45 11 042 091

BOSOWA

The logo of Universitas Bosowa Makassar is a shield-shaped emblem. At the top, it features a graduation cap and a golden laurel wreath. Below these, the text 'UNIVERSITAS BOSOWA' is written in white on a red banner. The central part of the shield depicts a white sailboat on a blue sea, with a globe and several yellow stars above it. The entire logo is set against a light blue background with a white grid pattern.

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

**ANALISIS PENENTUAN KECAMATAN PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh:

ANDI ARKAM

NIM. 45 11 042 091

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2018

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENENTUAN KECAMATAN PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN BARRU

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ARKAM

NIM. 45 11 042 091

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Ir. Syahfiar Tatto, M.S

NIDN: 0918026902

Pembimbing II

Ir. Jufriadi, M.SP.

NIDN: 0931016802

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar

Dr. Ridwan, ST, M.Si.

NIDN: 09101127101

Ketua Prodi
Perencanaan Wilayah dan Kota

JUFRIADI, ST., M.SP.

NIDN : 0931016802

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor : A.56/SK/FT/UNIBOS/II/2019 Pada Tanggal 22 Januari 2019 Tentang PANITIA DAN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, Maka :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 Januari 2019

Skripsi Atas Nama : Andi Arkam

Nomor Pokok : 4511042091

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Syahriar Tatto, M.S

Sekretaris : Jufriadi, ST, MSP

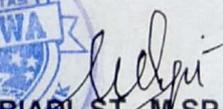
Anggota : 1. Dra. Umi Salama, M.STr

2. Ilham Yahya, ST, MSP

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

KETUA PRODI
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Dr. RIDWAN ST, M.Si
NIDN : 0910127101


JUFRIADI ST, M.SP.
NIDN : 0931016802

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Arkam

Nim : 45 11 042 091

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar karya saya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi / sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019

Penulis,


Andi Arkam

KATA PENGANTAR

Assalamu' Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang memiliki kehidupan ini, karena Rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan Judul “ **Analisis Penentuan Kecamatan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Barru**”. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis sadar akan kemampuan dan usaha, ini namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa serta keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dari tugas akhir ini.

Oleh karenanya, dengan rasa tulus dan ikhlas, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Ridwan. ST.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ir. Syahriar Tatto. MS Selaku Pembimbing I, dan Bapak Ir. Jufriadi, MSP Selaku pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan Skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Ir. Jufriadi, MSP, selaku Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar serta karyawan (i) jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar, terima kasih atas segala bimbingan, didikan dan bantuan selama

penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan sejak awal hingga selesai.

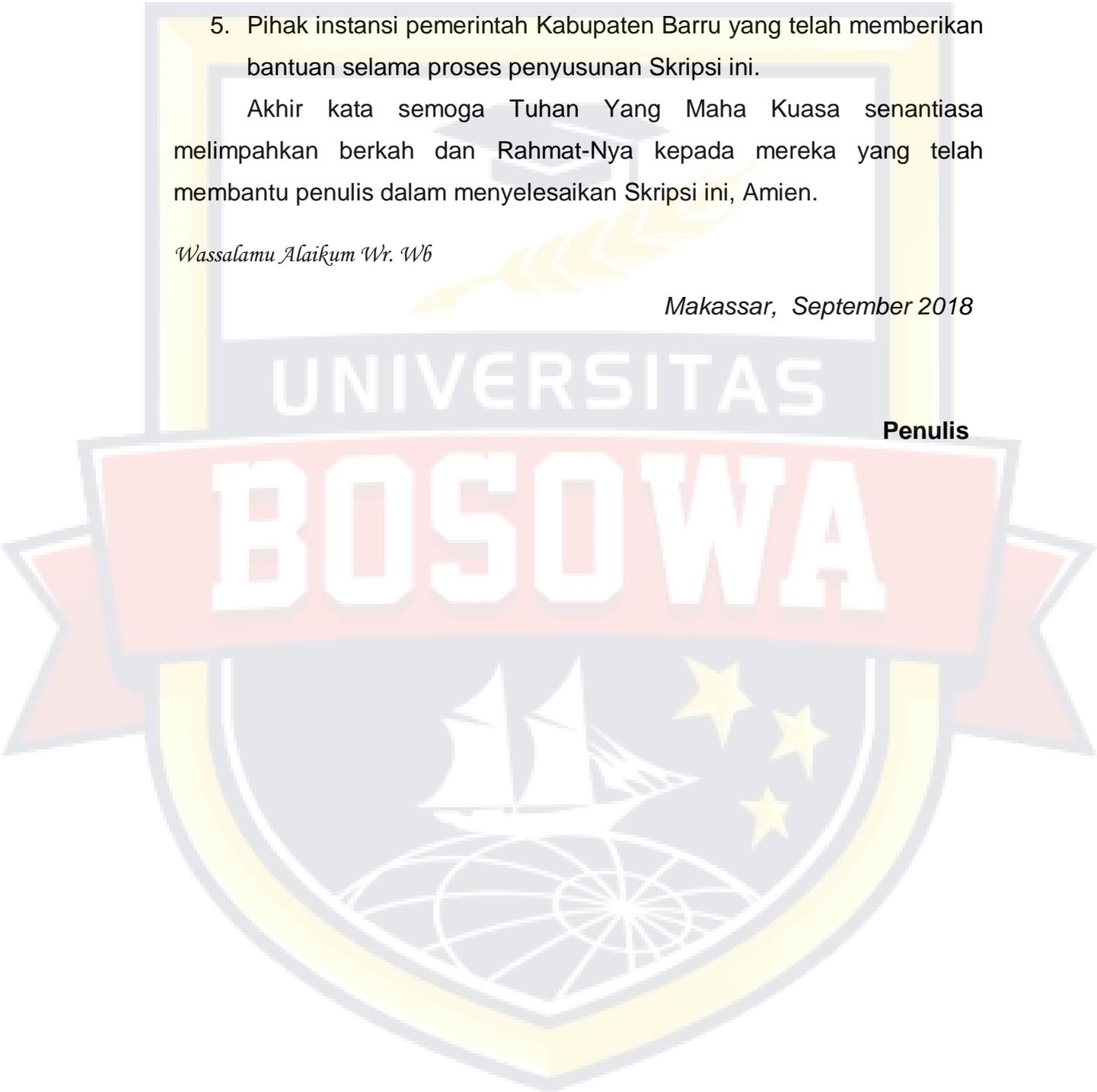
5. Pihak instansi pemerintah Kabupaten Barru yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, Amien.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar, September 2018

Penulis



**UNIVERSITAS
BOSOWA**

ABSTRAK

Andi Arkam, 2018. Analisis Penentuan Kecamatan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Sayhriar Tatto dan Jufriadi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecamatan manakah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru dan Menganalisis bagaimana interaksi antara kota-kota kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan metode Metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menganalisis variabel yang berhubungan dengan menggunakan alat analisis (rumus) statistik dan matematis secara jelas akurat untuk menjawab pertanyaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis skalogram dan rumus gravitasi.

Berdasarkan analisis skalogram dan gravitasi dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Barru merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru dikarenakan berfungsi sebagai penyedia fasilitas sosial, ekonomi dan ekonomi pemerintahan yang dibutuhkan oleh kecamatan-kecamatan di sekitarnya.

Interaksi Kecamatan Barru terlihat sangat tinggi dengan kecamatan-kecamatan yang jaraknya lebih dekat, yaitu Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Balusu. Sedangkan interaksi paling rendah terjadi karena faktor jarak yang sangat jauh antara Kecamatan Barru dengan Kecamatan Pujananting.

Disarankan agar dalam upaya mencegah dan mengurangi terjadinya disparitas sosial dan ekonomi, maka peningkatan peran dan fungsi Kecamatan lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi darat yang menunjang kelancaran kegiatan perekonomian seperti jaringan jalan dan sarana angkutan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan interaksi atau pergerakan manusia, barang dan jasa antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan sekitarnya sehingga kegiatan perekonomian kecamatan yang bukan sebagai pusat pertumbuhan juga mengalami pertumbuhan.

Kata kunci : *Pusat Pertumbuhan, Interaksi Wilayah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Tempat Sentral.....	12
B. Teori Sewa Lahan (Von Thunen).....	19
C. Teori Trickle Down Effect.....	21
D. Konsep Pusat Pertumbuhan.....	23
E. Pusat Pertumbuhan Ekonomi.....	30
F. Penelitian Terdahulu	33

G. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
1. Jenis Data	43
2. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
1. Pendataan Instansional.....	44
2. Telaah Pustaka.....	44
3. Dokumentasi.....	44
E. Variabel Penelitian.....	44
F. Metode Analisis.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru.....	55
1. Aspek Fisik Dasar.....	55
a. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	55
b. Kondisi Topografi dan Kelerengan.....	58
c. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah.....	58
d. Kondisi Kondisi Klimatologi.....	58
e. Kondisi Kondisi Klimatologi.....	58
2. Aspek Kependudukan.....	59
a. Jumlah Penduduk Tahun 2017.....	59

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk.....	60
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Barru.....	61
C. Gambaran Mikro Lokasi Penelitian.....	61
1. Data Jumlah Fasilitas Perkotaan Di Kabupaten Barru Dirinci Per Kecamatan.....	69
a. Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	71
b. Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	72
c. Jumlah Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik.....	72
d. Jumlah Fasilitas Perekonomian.....	74
e. Jumlah Fasilitas Peribadatan.....	75
2. Data Jarak Antar Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Barru.....	78
D. Kedudukan kecamatan Barru Dalam RTRW Kabupaten Barru.....	79
1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP).....	81
2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Barru.....	82
E. Hasil Penelitian.....	84
1. Analisis <i>Skalogram</i> Ketersediaan Fasilitas Perkotaan Di Kab. Barru.....	87
2. Analisis Interaksi Antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kecamatan Barru (Kota Mangempang).....	88
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Rekomendasi.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

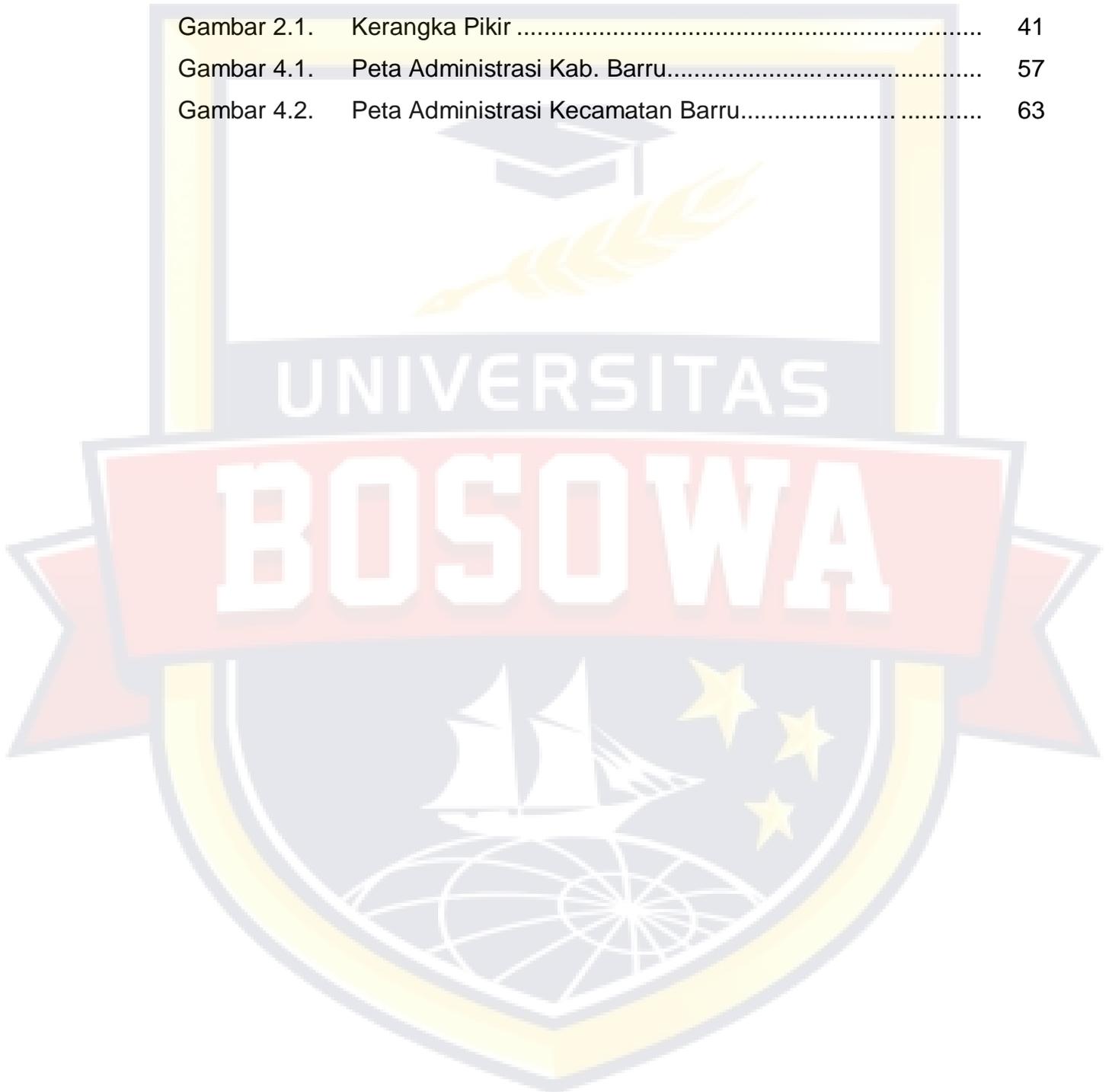


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kab. Barru, 2017.....	54
Tabel 4.2	Distribusi dan kepadatan penduduk di Kab. Barru Utara tahun 2017.....	55
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis kelamin di Kab. Barru Tahun 2017.....	59
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	60
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2017.....	62
Tabel 4.6	Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Barru Tahun 2017.....	63
Tabel 4.7	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kab.Barru Tahun 2017.....	65
Tabel 4.8	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab.Barru 2017.....	66
Tabel 4.9	Jumlah Fasilitas Pemerintahan dan Pelayan Publik Tahun 2016.....	68
Tabel 4.10	Jumlah Fasilitas Perekonomian di Kab.Barru Utara Tahun 2017.....	69
Tabel 4.11	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kab.Barru Utara Tahun 2017.....	70
Tabel 4.12	Jarak Antara Ibukota Kabupaten (Barru) dan Ibukota Kecamatan.....	73
Tabel 4.13	Hasil Tabulasi Skalogram Fasilitas Pelayanan Kecamatan-kecamatan di Kab.Barru Tahun 2017.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Pikir	41
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kab. Barru.....	57
Gambar 4.2.	Peta Administrasi Kecamatan Barru.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Interaksi antara dua wilayah akan melahirkan gejala baru yang meliputi aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Gejala tersebut dapat memberikan dampak bersifat menguntungkan (positif) atau merugikan (negatif) bagi kedua wilayah. Demikian pula halnya gejala interaksi antara dua desa dan kota.

Ekonomi suatu daerah baik itu Kabupaten maupun Kota yang berlangsung di Indonesia berjalan terus menerus dan tiap daerah tersebut berusaha untuk memajukan daerahnya. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan wilayahnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka daerah diharapkan akan terus memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan ekonomi di daerahnya tanpa menunggu bantuan dari pusat. Pembangunan Ekonomi adalah satu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Dalam konteks tersebut, maka pembangunan ekonomi diarahkan untuk memacu adanya pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sebuah daerah secara lebih adil bagi seluruh masyarakat yang ada. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi juga diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah dari perekonomian yang kecil dan sering berjalan ditempat (*stagnan*) menuju perekonomian daerah yang terus meningkat dan dinamis.

Nahrawi (2005), ciri-ciri dari daerah yang perekonomiannya meningkat secara terus menerus adalah; memiliki industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis-basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar selain itu, pertumbuhan juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang lainnya yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan yang ada jika diarahkan pada daerah-daerah yang telah memiliki potensi atau fasilitas wilayah juga akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah tersebut.

Dengan adanya peran Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian, serta mengembangkan dan mempercepat

perekonomian daerah yang ada, membuat pemerintah daerah harus dapat melihat dan menentukan wilayah-wilayah mana yang secara ekonomi, sosial, dan kultural memiliki potensi untuk dikembangkan, baik itu potensi yang ada secara alami maupun potensi yang telah tumbuh dikarenakan adanya pembangunan. Hal ini penting bagi pemerintah agar para pengambil kebijakan tersebut, dapat lebih menempatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya pada lokasi tepat yang akan memberikan dampak-dampak yang positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Terdapat dua perbedaan dalam suatu wilayah yang meliputi berbagai daerah, ada daerah yang penduduk/kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat dan ada juga yang kurang terkonsentrasi. (Tarigan, 2005). Tempat yang terkonsentrasi tersebut dikenal dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat perdagangan, pusat industri, simpul industri, pusat perdagangan, daerah perkotaan atau daerah nodal. Masing-masing istilah itu bersangkutan paut dengan fungsi apa yang hendak ditonjolkan atas tempat-tempat konsentrasi tersebut. Sedangkan pada daerah di luar pusat konsentrasi juga dinamakan dengan berbagai istilah seperti daerah pedalaman, daerah pertanian, daerah pedesaan atau disebut sebagai wilayah belakang (*hinterland*). Dengan adanya perbedaan daerah yang ada pada suatu wilayah, hal ini menyebabkan adanya hubungan antara kedua daerah yang berbeda tersebut. Adanya penjelasan terhadap kedua daerah ini

dapat bermanfaat dalam mengatur pembangunan dan menjamin suatu hubungan antar daerah-daerah tersebut, yang akan menciptakan keuntungan.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan dan penetapan kawasan strategis dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, maka kawasan strategis di Kabupaten Barru terdiri atas kawasan strategis provinsi (KSP) dan kawasan strategis kabupaten (KSK). Sedangkan penetapan kawasan strategis di Kabupaten Barru diarahkan atas dasar kepentingan, sebagai ; Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya, Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya dukung dan Lingkungan, Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi.

Penentuan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembagkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki kecenderungan pada, optimalisasi potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan

yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru, Kawasan Perkotaan Barru yang merupakan salah satu kota di wilayah Kabupaten Barru diarahkan sebagai sub pusat pengembangan wilayah, dengan fungsi sebagai pelayanan sosial, ekonomi perdagangan dan jasa. Sedangkan Kawasan Perkotaan Barru diarahkan pengembangannya sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa.

Penduduk Kabupaten Barru berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 183.596 jiwa yang terdiri atas 83.082 jiwa penduduk laki-laki dan 89.685 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,5persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,56 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,45 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,64.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2017 mencapai 147 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 7 kecamatan cukup beragam

dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan sebesar 427 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pujananting sebesar 42 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 persen dari tahun 2016.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 91,27. Sedangkan kepadatan penduduk di kabupaten Barru tahun 2017 mencapai 163 jiwa/km², dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan tertinggi terletak di Kecamatan Barru, dengan kepadatan sebesar 34,099 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kao Teluk sebesar 4,012 jiwa/km².

Kecamatan Barru juga mengalami pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk dalam tiga tahun terakhir yaitu sebesar 32,546 jiwa pada tahun 2014, mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 38.574 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah penduduk sebesar 408 jiwa atau pertumbuhan sebesar 1,05 persen dalam tiga tahun terakhir.

Data BPS Kecamatan Barru menunjukkan bahwa tanah kosong yang tersedia di Ibukota Kecamatan Barru semakin berkurang pada tahun 2017. Semakin berkurangnya tanah kosong yang ada di Ibukota Kecamatan Barru menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi

lahan. Terjadinya perubahan fungsi lahan ini semakin menguatkan posisi Ibukota Kecamatan Barru sebagai Pusat Pertumbuhan di Wilayah Kabupaten Barru.

Fakta bahwa banyaknya fasilitas pelayanan umum maupun pelayanan sosial yang terdapat di Ibukota Kecamatan Barru. Misalnya, ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran, perdagangan, serta pariwisata dan perhotelan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemusatan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat perkotaan. Dilain sisi, Ibukota Kecamatan Barru juga merupakan salah satu kota yang menyediakan pelayanan jasa dan industri, di Kabupaten Barru. Ibukota Kecamatan Barru mempunyai beberapa fasilitas umum dan sosial yang melayani aktifitas masyarakat di Barru dan sekitarnya.

Secara geografis jarak tempuh rata-rata dari setiap ibukota Kecamatan (Barru) ke ibukota Kabupaten adalah 14 km, suatu jarak yang cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi terutama yang berasal dari kecamatan yang cukup jauh dengan ibukota Kabupaten (Kec. Soppeng Riaja). Dari ke 7 (tuju) kecamatan yang ada di Barru, Kecamatan Tanette Riaja merupakan kecamatan yang berada paling jauh dari ibukota kabupaten Barru, jaraknya yaitu sekitar 45 Km dari Ibukota Kecamatan Barru (BPS Kab. Barru, 2018).

Jarak antar kota-kota Kecamatan di Kabupaten Barru cukup berpengaruh. Jarak terdekat antara ibu kota Kecamatan adalah antara ibukota Kecamatan Barru dengan Ibukota Kecamatan Balusu (Madello). Sedangkan jarak paling jauh yaitu jarak dari ibukota Kecamatan Tanaette Riaja dengan Ibukota Kecamatan Barru (Kota Mangempang) yang merupakan ibukota Kabupaten Barru.

Beranjak dari pembahasan latar belakang, dengan beberapa issue strategis yang merupakan potensi bagi kota-kota kecamatan di Wilayah Kabupaten Barru, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Analisis Penentuan Kecamatan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Barru”** dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi salah satu acuan dalam perumusan rencana tata ruang yang komprehensif dan bersinergi antar satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kabupaten Barru, selain itu untuk menghindari disparitas wilayah yang disebabkan terkonsentrasinya kegiatan penduduk di suatu wilayah tertentu sehingga membentuk suatu pusat-pusat ekonomi atau pusat-pusat perdagangan.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan gambaran pada latar belakang, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Kecamatan manakah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru ?

2. Bagaimana interaksi antara kota-kota kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam studi ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kecamatan manakah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.
- b. Menganalisis bagaimana interaksi antara kota-kota kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, terutama mengenai Pusat Pertumbuhan, sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah di daerah. Juga, dapat menjadi tambahan kajian-kajian yang meneliti fungsi pelayanan, agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan yang sama.

2. Manfaat Praktis.

Memberikan informasi, karena dengan penelitian ini akan dapat diketahui daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan daerah mana saja yang menjadi *hinterland* di wilayah Kabupaten

Barru. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam pertimbangan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru berkaitan dengan penentuan pusat pertumbuhan yang ada di daerahnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian.

1. Ruang Lingkup Wilayah.

Batasan penelitian pada konteks wilayah menjadi sangat penting, dimana wilayah penelitian (locus) menentukan segmentasi luas cakupan materi kajian, termasuk data kondisi fisik wilayah dan luasan wilayah penelitian. Ruang lingkup wilayah atau batasan wilayah dalam penelitian ini adalah mencakup semua kecamatan (kota-kota kecamatan) yang berada di dalam wilayah Kabupaten Barru.

2. Ruang Lingkup Materi.

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah, kajian tentang kecamatan manakah yang menjadi pusat pertumbuhan, baik menentukan hierarki satu (hierarki 1) hingga menentukan hierarki selanjutnya (hierarki 2,3 dst), selain itu analisis dan kajian tentang interaksi antar wilayah kecamatan untuk mengetahui bagaimana pola dan besaran interaksi wilayah di Kabupaten Barru.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan penulisan ini secara sistematis, maka diuraikan dalam bentuk sistematika penulisan yang secara garis

besar menguraikan Bab dan Sub Bab dalam penulisan Skripsi ini, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan tentang teori kutub pertumbuhan, teori pusat pertumbuhan dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan definisi operasional

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Barru, gambaran umum tentang Kecamatan Barru, Tinjauan Rencana tata Ruang Kabupaten Barru, serta Hasil Analisis Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tempat Sentral.

Teori tempat sentral merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa daerah-daerah nodal itu mempunyai hirarki. Tidak semua daerah bersifat homogenitas tetapi terdapat perbedaan baik dalam persebaran penduduk maupun luas wilayahnya (Richardson, 2001:83). Oleh karena itu, sangat penting mengetahui tingkat hierarki suatu daerah sehingga dapat dilihat apa yang dibutuhkan oleh daerah dan kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk daerah tersebut.

Menurut Christaller, setiap orde memiliki wilayah heksagonalnya sendiri-sendiri dan lebar barang Orde I sama dengan 3 kali lebar barang Orde II demikian seterusnya. Hal ini berarti barang Orde I memiliki luas jangkauan tiga kali barang Orde II. Jadi ada barang yang jangkauan pemasarannya cukup luas dan ada yang sedang dan kecil. Christaller juga mengatakan bahwa berbagai jenis barang pada orde yang sama cenderung bergabung pada pusat dari wilayahnya sehingga terjadi pusat konsentrasi. Oleh karena itu pada kenyataannya, terdapat hierarki diantara pusat-pusat konsentrasi tersebut. Berdasarkan $k=3$, pusat dari hierarki yang lebih rendah berada pada pengaruh pusat hierarki yang lebih tinggi (Robinson, 2010:82).

Dalam penentuan lokasi permukiman, dibutuhkan analisis dengan metode yang tepat agar lokasi tersebut optimal. Penentuan lokasi permukiman ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek tersebut dapat disebut juga sebagai satuan permukiman. Adapun syarat dari satuan permukiman antara lain adanya lokasi (lahan) dengan lingkungan dan sumber daya yang mendukung, adanya kelompok manusia (masyarakat), sumber daya buatan, dan terdapat fungsi kegiatan ekonomi sosial dan budaya.

Teori Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah.

Bunyi teori Christaller adalah Jika persebaran penduduk dan daya belinya sama baiknya dengan bentang alam, sumber dayanya, dan fasilitas transportasinya, semuanya sama/seragam, lalu pusat-pusat pemukiman menyediakan layanan yang sama, menunjukkan fungsi yang serupa, dan melayani area yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat pemukiman dengan pusat pemukiman lainnya.

Konsep Teori Christaller :

- Range (jangkauan)
- Jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan kebutuhannya.
- Threshold (ambang penduduk) Jumlah minimal penduduk untuk dapat mendukung suatu penawaran jasa.

Central place yang menyediakan barang dan jasa untuk wilayah disekelilingnya membentuk sebuah hierarki. Makin tinggi tingkat barang dan jasa, makin besar range-nya dari penduduk di tempat kecil. Christaller berasumsi pada homogenitas karakter fisik dan homogenitas karakteristik penduduk. Christaller menggunakan bentuk *hexagon* untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling bersambungan. Lingkaran yang mencerminkan wilayah yang saling bertindih lalu dibelah dua dengan garis lurus. Sehingga dapat dipilih lokasi yang paling efisien. Sehingga dengan membayangkan hexagonal-hexagonal tersebut terciptalah *hierarki pemukiman* dan *wilayah pasaran*.

Berikut ini asumsi – asumsi Christaller dalam penyusunan teorinya :

- Konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu.
- Jangkauan (*range*) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
- Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa.
- Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya.

- Wilayah tersebut adalah suatu dataran yang rata, mempunyai ciri-ciri ekonomis sama dan penduduknya juga tersebar secara merata.

Teori tempat pusat memiliki elemen dasar yang terdiri dari : fungsi sentral, yakni adanya suatu tempat pusat yang dibentuk oleh fungsi yang bersifat memusat karena fungsi (barang/jasa) hanya ada pada beberapa titik tertentu saja. *Threshold* (batas ambang) adalah jumlah penduduk tertentu yang mendukung keberadaan fungsi tertentu. Fungsi dalam hal ini yaitu kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Jumlah yang dimaksud dapat meliputi beberapa puluh

keluarga bagi satu atau beberapa ratus keluarga bagi suatu pasar harian. Kalau jumlah itu di bawah jumlah tertentu/ambang, maka pelayanan menjadi mahal dan kurang efisien; sebaliknya bila meningkat di atas jumlah ambang pelayanan akan menjadi kurang baik dan kurang efektif. Bila kegiatan itu menyangkut jual beli maka jumlah penduduk di bawah ambang akan mengakibatkan rugi dan terancam tutup, sebaliknya bila di atas ambang maka akan memperoleh untung dan mengundang entry serta dalam jangka waktu tertentu mempertajam persaingan.

Kemudian range yakni jarak di mana penduduk masih mau untuk melakukan perjalanan untuk mendapatkan pelayanan atau fungsi tertentu. Lebih jauh dari jarak ini orang akan mencari tempat lain yang lebih dekat untuk memenuhi kebutuhannya akan jasa yang

sama. Dari elemen dasar tersebut muncullah sebuah pola, yaitu pola heksagonal. Pola heksagonal yaitu pusat-pusat membentuk segitiga pelayanan yang jika digabungkan akan membentuk pola heksagonal yang merupakan wilayah pelayanan yang dianggap optimum.

Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat, yaitu :

- Topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungan dengan jalur pengangkutan ;
- Kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara.
- Teori Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Model Christaller ini merupakan suatu sistem geometri yang menjelaskan model area perdagangan heksagonal dengan menggunakan jangkauan atau luas pasar dari setiap komoditi yang dinamakan *range* dan *threshold*.

(a) Prinsip pasar (*marketing principle*) $k=3$: pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya, seperti pasar, sering disebut kasus pasar optimal. Dinamakan $K=3$ ($K3$), karena suatu kegiatan di

tempat pusat akan melayani 3 tempat pusat untuk fungsi di bawahnya yaitu 1 tempat pusat sendiri di tambah 2 tempat pusat hirarki di bawahnya.

(b) Prinsip lalu lintas (*traffic principle*) $k=4$: bagaimana meminumkan jarak penduduk untuk mendapatkan pelayanan fungsi di tempat pusat. Bersifat linier, karena tempat pusat berada pada titik tengah dari setiap sisi heksagon. Sehingga daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang terpengaruh senantiasa memberikan kemungkinan jalur lalu lintas paling efisien, sering disebut situasi lalu lintas yang optimum. Teori ini disebut sebagai $k=4$ karena 1 empat pusat melayani empat tempat pusat lain; 1 pada tempat pusatnya itu sendiri dan 3 dari tempat pusat lain.

(c) Prinsip administrasi (*administrative principle*) $k=7$: wilayah ini mempengaruhi wilayahnya sendiri dan seluruh bagian wilayah – wilayah tetangganya, prinsip utamanya adanya kemudahan dalam rentang kendali pengawasan pemerintahan, sehingga sering disebut situasi administrative optimum dimana keenam pusat hirarki di bawahnya berada pada batas wilayah pelayanan hirarki di atasnya.

Teori Tempat Pusat oleh Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Model Christaller menggambarkan area pusat-

pusat kegiatan jasa pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah membentuk pola segi enam, yang secara teori bisa memberikan keuntungan optimal pada kegiatan tersebut. Tempat – tempat pusat tersebut yakni sebagai suatu tempat yang menyediakan barang dan jasa-jasa bagi penduduk daerah belakangnya.

Elemen–elemen tempat pusat yakni range (jangkauan), threshold, dan fungsi sentral Ketiga elemen itu yang mempengaruhi terbentuknya tempat pusat dan luasan pasar baik pelayanan barang maupun jasa pada suatu wilayah. Teori tempat pusat merupakan teori mengenai hubungan fungsional antara satu tempat pusat dan wilayah sekelilingnya. Juga merupakan dukungan penduduk mengenai fungsi tertentu. Christaller tidak mendasar pada jangkauan wilayah pasar, dan memiliki hirarki – hirarki dalam pola heksagonalnya. Luas wilayah pasar juga tidak tergantung pada barang yang diproduksi.

Teori tempat sentral sangat relevan untuk digunakan didalam perencanaan wilayah, hal ini dikarenakan teori tempat sentral menjelaskan tiga konsep dasar yang sangat penting peranannya dalam membangun wilayah yakni ambang (*threshold*), lingkup (*range*) dan hierarki (*hierarchy*). Ketiga konsep tersebut, dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan ketergantungan antara pusat-pusat konsentrasi dan wilayah-wilayah disekitarnya (Adissasmita,2005: 57).

B. Teori Sewa Lahan (Von Thunen 1783-1850).

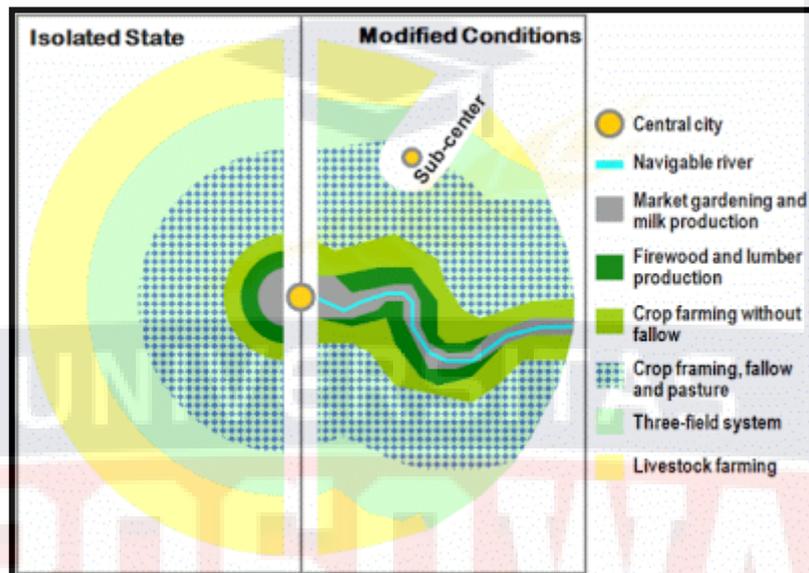
Johan Heinrich Von Thunen (1783-1850) adalah ahli ekonomi pertanian asal Jerman yang membuat teori tentang lokasi pertanian pada awal abad ke 19. Von Thunen mengembangkan teori ini berdasarkan pengamatan di daerah tempat tinggalnya. Inti dari teori Von Thunen adalah, ia menitikberatkan pada 2 hal utama tentang pola keruangan pertanian yaitu:

1. Jarak lokasi pertanian ke pasar
2. Sifat produk pertanian (keawetan, harga, beban angkut)

Pada zaman itu banyak wilayah pertanian terletak di wilayah yang tidak strategis. Petani yang berada di lokasi jauh dari pusat pasar atau kota, harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjual hasil panennya. Padahal di zaman tersebut alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian masih berupa gerobak yang ditarik oleh sapi, kuda atau keledai. Biaya transportasi yang dikerahkan tidak sebanding dengan upah yang di dapat. Hal ini menunjukkan betapa mahalanya kota sebagai pusat pasar. Dari hasil studi inilah Von Thunen mengeluarkan teori lokasi pertanian.

Inti dari teori Von Thunen adalah bahwa harga sewa lahan pertanian akan berbeda-beda nilainya tergantung tata guna lahannya. Lahan yang berada di dekat pusat pasar atau kota akan lebih mahal di bandingkan lahan yang jauh dari pusat pasar. Karena jarak yang makin jauh dari pusat pasar, akan meningkatkan biaya transportasi.

Pola keruangan pertanian menurut Von Thunen akan berbentuk seperti lingkaran pada gambar di bawah ini



Gambar 2.1 Pola Keruangan Von Thunen

Gambar tersebut terbagi 2, yang pertama mencirikan "*isolated area*" yang memperlihatkan daerah yang teratur, sedangkan gambar kedua memperlihatkan adanya moda transportasi sungai. Semua petani akan memaksimalkan produktivitas lahannya mengikuti permintaan pasar.

Model Teori Lokasi Pertanian Von Thunen membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar dan biaya transportasi. Kewajiban petani adalah memaksimalkan keuntungan yang didapat dari harga pasar dikurang biaya transportasi dan biaya produksi. Aktivitas yang paling produktif seperti berkebun dan produksi susu

sapi, atau aktivitas yang memiliki biaya transportasi tinggi seperti kayu bakar, lokasinya dekat dengan pasar.

C. Teori *Trickle Down Effect*.

Albert Otto Hirschman (7 April 1915 - 10 Desember 2012) adalah seorang ekonom yang sangat berpengaruh dan penulis beberapa buku tentang ekonomi politik dan ideologi politik. Kontribusi besar pertamanya adalah di bidang pengembangan ekonomi. Di sini ia menekankan perlunya pertumbuhan tidak seimbang.

Salah satu teori dari Albert O Hirschman adalah "*trickle down effect*" (efek ke bawah -- kemakmuran). Begitu dahsyatnya kalau teori

tersebut bisa terlaksana dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sayang sekali, kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru, yang gembar-gembor pakai pendekatan kemakmuran rakyat, dengan jargon "*trickle down effect*", tidak terjadi, bahkan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, serta kecemburuan sosial...

Kita sangat paham kalau perkembangan ekonomi yang membaik juga melahirkan paradoks. Justru pesatnya perkembangan ekonomi saat ini yang bisa mengalami "*trickle up effect*" (efek ke atas - - kemakmuran). Hasilnya tidak dinikmati secara merata, melainkan hanyalah segelintir orang kaya. Maksudnya pertumbuhan ekonomi hanya diuntungkan bagi masyarakat kaya.

Indikator tersebut diatas, setidaknya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat, sementara kemiskinan dan

pengangguran tidak beranjak turun, bahkan cenderung naik. Sedangkan dari sisi lain, beberapa industri mencatat kemajuan produksi, seperti sepeda motor, elektronik, mobil. Jelas adanya kenaikan penjualan, lantas siapa yang menikmati perkembangan ekonomi tersebut? Investor atau rakyat?

Penyebab "*trickle up effect*" antara lain belum teratasinya secara komprehensif dan menyeluruh persoalan struktural pada saat krisis ekonomi. Dan akibat program penyesuaian ekonomi yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Tentu sangat berbeda dengan "*trickle down effect*", yakni dalam konteks menetes ke bawah, berarti pertumbuhan ekonomi sekian persen, bisa menciptakan lapangan kerja sekian ratus ribu yang turut mensejahterakan masyarakat.

Inti dari teori yang disampaikan oleh Hirschman menjelaskan tentang dampak tetesan kebawah dan dampak penyebaran dan pengurasan. Dimana pengembangannya melalui satu titik yang diharapkan bisa mempengaruhi titik-titik yang ada disekitarnya.

Ide pokok dari model Hirschman adalah bahwa efek polaritas disebabkan oleh "*effect trickling down*", ekuivalen dengan efek penyebaran dari Myrdal. *Effect trickling down* meliputi tujuan komoditi North yang diproduksi di South dan gerakan modal keselatan, disamping North dapat menarik tenaga selatan yang cukup untuk menjamin meningkatnya produktivitas tenaga kerja marjinal dan

tingkat konsumsi perkapita South. Hirschman bersikeras bahwa *effect trickling down* hanya bisa terjadi bila di North membutuhkan South untuk ekspansinya sendiri.

D. Konsep Pusat Pertumbuhan.

Ketidakhomogenya wilayah dalam suatu daerah baik dalam jumlah penduduk, iklim, cuaca bahkan fasilitas sosial dan ekonomi menyebabkan adanya daerah nodal dan spasial. Pada daerah nodal biasanya lebih cepat bertumbuh daripada wilayah belakangnya dikarenakan pada daerah nodal memiliki keuntungan agglomerasi ekonomi dan distribusi penduduk yang terpusat. Akan tetapi tidak

semua daerah nodal tersebut mengalami pertumbuhan secara merata tetapi sering terdapat titik-titik yang menjadi pendorong perkembangan kegiatan daerah nodal yang dinamakan sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk mempercepat peningkatan pendapatan terdapat suatu keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa pusat kekuatan ekonomi dalam suatu negara atau daerah (Perroux dalam Adisasmita, 2005:60).

Konsep Pusat Pertumbuhan (*growth point concept*) terutama yang berasal dari teori kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Perancis yang bernama Perroux (1950) dengan teorinya *Pole Croisance* atau *Pole de Development*. Pemikiran dasar dari teori ini adalah kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung terpusat pada satu titik lokal (pusat). Dan kegiatan ekonomi tersebut

akan semakin berkurang pengaruhnya jika semakin menjauh dari pusat pertumbuhan tersebut. maka dapat dikatakan pusat tersebut sebagai titik pertumbuhan sedangkan daerah sekitarnya yang masih terpengaruh adalah daerah pengaruhnya. Menurut Richardson (1969), berdasarkan penafsiran ini distribusi ruang dari penduduk dapat dianggap sebagai hal yang diorganisir menjadi sistem pusat hierarki dan kaitan fungsional (Sihotang, 2001 : 97).

Konsep Pusat pertumbuhan ini dapat dijelaskan dengan dua cara yaitu konsep pusat pertumbuhan secara fungsional dan secara geografis. Secara *fungsional*, pusat pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara *geografis*, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut dan masyarakat senang datang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2005 : 162-163).

Selanjutnya menurut Sihotang (2001 : 97), semakin kuat ciri-ciri nodal dari daerah yang bersangkutan, akan semakin tinggi tingkat

pertumbuhannya dan perkembangan ekonomi sosialnya. Dengan demikian, kebijakan regional yang diterapkan akan berhasil jika kebijakan tersebut mendukung ciri-ciri nodal alami yang sudah terbentuk pada daerah tersebut. Selain itu, pusat-pusat penduduk yang besar mempunyai potensi pasar yang tinggi dan secara kultural dan sosial lebih menarik untuk dikembangkan. Dengan demikian titik pertumbuhan biasanya terjadi secara alami dan kemudian dikembangkan, karena peningkatan ekonomi pada pusat pertumbuhan tersebut amat tergantung dari penggunaan sumber daya yang digunakan pada titik dan daerah pengaruhnya.

Konsep Titik Pertumbuhan (*growth point concept*) ini merupakan mata rantai antara struktur daerah-daerah nodal yang berkembang dengan sendirinya dan perencanaan fisik dan regional. Sebagaimana telah diketahui, keuntungan-keuntungan aglomerasi menyebabkan konsentrasi produksi lebih efisien dari pada yang terpecah-pecah, sedangkan keseimbangan antara keuntungan-keuntungan skala dalam penyediaan pelayanan-pelayanan sentral dan keinginan akan kemudahan hubungan telah mengakibatkan konsentrasi penduduk yang tersusun dalam suatu hierarki difokuskannya pusat-pusat sub-regional bagi pertumbuhan telah membantu menjembatani celah antara teori lokasi dan teori ekonomi regional. Richardson, juga memasukkan unsur kesatuan dan pengarahan ke dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan regional seperti;

pembuatan prasarana pada titik-titik pertumbuhan, lokasi perumahan baru, dan pengaliran migrasi intra-regional dan perjalanan ke tempat kerja ke pusat-pusat yang direncanakan.

Untuk mengukur daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah atau besarnya interaksi antar daerah dapat dilakukan dengan analisis gravitasi. Analisis gravitasi dilandaskan pada asumsi bahwa interaksi antara dua pusat mempunyai hubungan proporsional langsung dengan "massa" dari pusat-pusat bersangkutan dan mempunyai hubungan proporsional terbalik dengan "jarak" antara pusat-pusat tersebut. Variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur "massa" dan "jarak" adalah tergantung pada persoalan yang hendak dicapai dan ketersediaan data. Variabel yang dapat mewakili "massa" antara lain; penduduk, kesempatan kerja, pendapatan, pengeluaran, sementara variabel yang dapat mewakili "jarak" dinyatakan dalam ukuran fisik, waktu, harga dan lain-lain (Glasson dalam Paul Sihotang, 1990 : 27). Selanjutnya menurut Sihotang (2001 : 97), semakin kuat ciri-ciri nodal dari daerah yang bersangkutan, akan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan perkembangan ekonomi sosialnya. Dengan demikian, kebijakan regional yang diterapkan akan berhasil jika kebijakan tersebut mendukung ciri-ciri nodal alami yang sudah terbentuk pada daerah tersebut. Selain itu, pusat-pusat penduduk yang besar mempunyai potensi pasar yang tinggi dan secara kultural dan sosial lebih menarik untuk dikembangkan. Dengan

demikian titik pertumbuhan biasanya terjadi secara alami dan kemudian dikembangkan, karena peningkatan ekonomi pada pusat pertumbuhan tersebut amat tergantung dari penggunaan sumber daya yang digunakan pada titik dan daerah pengaruhnya.

Pemikiran dasar dari titik pertumbuhan adalah bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu wilayah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah titik-titik lokal. Di dalam suatu wilayah, arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-titik lokal ini, walaupun kepadatan dari arus tersebut akan berkurang karena jarak. Di sekitar titik lokal (pusat dominan) ditentukan garis perbatasan dimana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis minimum, pusat tersebut dapat dinamakan sebagai titik pertumbuhan, dan untuk wilayah di dalam garis perbatasan merupakan wilayah pengaruhnya (wilayah pertumbuhan) atau yang sering disebut sebagai daerah *hinterland* (Tarigan, 2005: 154).

Berdasarkan penjelasan di atas, distribusi penduduk secara spasial tersusun dalam sistem pusat hirarki dengan kaitan-kaitan fungsional. Semakin kuat ciri-ciri nodal dari wilayah-wilayah yang bersangkutan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan demikian juga halnya dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosialnya. Dengan demikian rencana pengembangan wilayah akan lebih berhasil jika rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat ciri-ciri titik pertumbuhan alamiah yang terdapat di masing-masing wilayah.

Strategi titik pertumbuhan dapat ditafsirkan sebagai upaya mengkombinasikan ciri-ciri tempat sentral yang mempunyai orde tinggi dan lokasi potensial yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi.

Menurut Richardson, yang menyebabkan terjadinya pusat pertumbuhan dikarenakan adanya keuntungan aglomerasi yang didapat dari keputusan untuk berlokasi pada tempat yang terkonsentrasi. Keuntungan aglomerasi ini didapat karena adanya keuntungan skala yang berasal dari antara lain; fasilitas-fasilitas perbankan, sosial, pemerintahan, pasar tenaga kerja, perusahaan jasa-jasa khusus tertentu (Richardson dalam Paul Sihotang, 2001:96).

Para pemilik modal akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah aglomerasi, sehingga menyebabkan industri – industri menjadi terpusat di daerah ini terutama industri inti (dalam skala besar). Industri inti mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah (Perroux dalam Adissasmita, 2005:61).

Menurut Robinson, pusat pertumbuhan dapat diartikan melalui dua cara, yakni pendekatan fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan merupakan sekelompok usaha atau kegiatan ekonomi lainnya yang terkonsentrasi pada suatu daerah dan memiliki hubungan yang dinamis, dan saling mendorong sehingga dapat mempengaruhi perekonomian daerah itu maupun daerah

belakangnya. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas sehingga menjadi pusat daya tarik bagi berbagai macam dunia usaha. Menurutnya, pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier effect (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (Robinson, 2010:128-129).

Menurut Broom dan Selznick (dalam Daldjoeni 1997 : 138) terdapat tiga kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah kota yaitu :

1. Kota harus Memiliki kepadatan penduduk begitu rupa sehingga bagian besar dari lahannya digunakan untuk kepentingan perumahan, perdagangan, dan perindustrian, termasuk dengan sendirinya transportasi.
2. Kota terpisah dari kota-kota lain yang dipisahkan oleh ruang (dapat berupa daratan atau perairan) yang digunakan untuk pertanian atau usaha lainnya, atau tidak digunakan sama sekali.
3. Ruang atau jarak yang ada diantara kota yang satu dengan kota-kota yang lain cukup jauh untuk ditempuh para pelaju sehari-hari (pekerja) dalam rangka perjalanan mereka untuk bekerja.

Dari tiga kriteria tersebut dapat diketahui bahwa di dalam sebuah kota juga terdapat bagian-bagian kota yang resmi, yakni pusat-pusat gedung pemerintahan, adanya pinggiran kota, kota-kota

satelit yang terletak di sepanjang jalan keluar kota, semua komponen tersebut secara sosial dan ekonomi terintegrasi ke dalam pusat kota.

Pusat Pertumbuhan/Kota juga dengan sendirinya berkuasa secara organisasi atas bagian-bagian yang lain dan juga atas kota-kota kecil yang tersebar disekitarnya. Makin dekat kota tersebut makin kuat pengaruhnya dan makin jauh kedudukan kota maka makin lemah juga pengaruhnya terhadap kota-kota tersebut. Pengaruh ini meliputi pengaruh *finansial ekonomis* (bank dan pasar), *kultural* (pendidikan dan hiburan), serta *komunikasi* (surat kabar, radio, televisi). (Daldjoeni 1997 : 139).

E. Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antarsektor masih menjadi bagian dari tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan. Menurut Djojohadikusumo (1994), pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan menurut Arsyad (1999) pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada melalui suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Menurut Weiss (1988) dalam Tambunan (2001), pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku dan teknologi tersedia.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meskipun telah mendapatkan kebebasan dari pemerintah dalam hal pengaturan dan pengelolaan daerahnya melalui Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan undang-undang turunannya, pada kenyataannya tidak serta merta menjadikan semua daerah berkembang dengan pesat. Meskipun setiap daerah mempunyai keinginan yang sama dalam upaya mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat wilayahnya, namun tantangan dan hambatan setiap daerah pun berbeda-beda antara lain karena potensi atau keunggulan berbeda-beda.

Menurut Rustiadi, et. al (2009), hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain faktor struktur sosial ekonomi dan distribusi spasial dari sumberdaya bawaan yang mencakup faktor geografi, sejarah, politik, kebijakan pemerintah, administrasi, sosial budaya dan ekonomi. Perbedaan pertumbuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas antar wilayah ini, bukan hanya terjadi antar provinsi di wilayah Indonesia, tetapi antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia, bahkan antar kecamatan. Terjadinya disparitas disamping alasan yang dikemukakan di atas, juga dipicu oleh terkonsentrasinya kegiatan penduduk di suatu wilayah tertentu sehingga membentuk suatu pusat-pusat ekonomi atau pusat-pusat perdagangan.

Adnan (2009) menunjukkan bahwa penetapan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pembangunan ekonomi yang dianggap penting oleh pemerintah daerah. Meskipun pembangunan ekonomi yang berupa peningkatan output dan pendapatan riil per kapita bukan satu-satunya sasaran kebijakan namun kebijakan ekonomi dalam rangka kenaikan pertumbuhan output harus dilakukan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai suatu syarat dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga sebagai prasyarat dalam mencapai tujuan pembangunan seperti pembangunan bidang pendidikan/ peningkatan SDM, pembangunan bidang kesehatan, sarana dan prasarana sosial dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan

dari suatu daerah belum tentu sesuai bagi daerah lain karena masing-masing daerah kondisi dan potensinya berbeda dan tergantung dari masalah yang ada maupun kebutuhan daerah yang bersangkutan.

F. Penelitian Terdahulu.

Hasil penelitian sejenisnya (terdahulu) menjadi penting, dikarenakan menjadi pemandu atau contoh bagi penelitian selanjutnya. Dalam sebuah penyusunan rencana, dibutuhkan road map (peta jalan) atau blue print (cetak biru), tujuannya sebagai pemandu.

Muhammad Sahid Assagaf (2017) meneliti tentang Analisis Ibukota Kecamatan Tobelo Sebagai Pusat Pelayanan di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ibukota Kecamatan Tobelo menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Halmahera Utara dan Menganalisis bagaimana pola interaksi antara kota-kota yang berada di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan metode/pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menganalisis variabel yang berhubungan dengan menggunakan alat analisis (rumus) statistik dan matematis secara jelas akurat untuk menjawab pertanyaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis skalogram dan rumus gravitasi. Berdasarkan analisis skalogram dan gravitasi dapat disimpulkan bahwa ibukota Kecamatan Tobelo (Kota Gamsungi) di Kabupaten Halmahera Utara berfungsi

sebagai penyedia fasilitas sosial, ekonomi dan ekonomi politik/pemerintahan yang dibutuhkan oleh kecamatan-kecamatan di sekitarnya serta diharapkan dapat menjadi tempat konsentrasi permukiman penduduk agar tercipta pola permukiman yang optimal di pusat kota. interaksi Kecamatan Tobelo sangat dengan kecamatan-kecamatan yang jaraknya lebih dekat, yaitu Kecamatan Tobelo Tengah, Tobelo Selatan dan Tobelo Utara. Sedangkan interaksi paling rendah terjadi karena faktor jarak yang sangat jauh antara Kecamatan Tobelo dengan Kecamatan Kao Teluk. Disarankan agar upaya peningkatan peran dan fungsi Kecamatan lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera, sudah semestinya mempertimbangkan struktur tata ruang Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara sesuai kenyataan yang ada

Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2010) dengan judul “Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, analisis Gravitasi/Interaksi, analisis Tipologi Klassen dan analisis LQ. Dengan menggunakan analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas diperoleh terdapat tujuh kecamatan yang mempunyai

hierarki dengan kategori tinggi keatas sebagai pusat pertumbuhan yaitu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Tawangmangun, Kecamatan Karangpandan, dan Kecamatan Gondang Rejo. Berdasarkan analisis tipologi klassen, diperoleh posisi perekonomian tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah berada pada daerah yang relatif tertinggal (kuadran ketiga) kecuali Kecamatan Jaten, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Kebakkramat. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis Location Quation (LQ) diperoleh yang menjadi sektor basis di setiap kecamatan. Sektor Pertanian; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan; Hotel dan Restoran adalah sektor basis di Kabupaten Karanganyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutikno dan Maryunani yang berjudul “Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Tipologi Klassen, Location Quatiant (LQ), Shif-Share (S-S), analisis Skalogram dan Analisis Daya Saing. Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen, diperoleh SWP yang ada di Kabupaten Malang dibagi atas empat pola pertumbuhan, yaitu SWP I merupakan daerah “berkembang cepat”, SWP II, III merupakan daerah “cepat tumbuh dan cepat maju”, SWP IV, VI, VII merupakan daerah “relatif tertinggal”,

sementara SWP V, VIII adalah daerah “Maju tetapi tertekan”. Sementara berdasarkan analisis LQ dan Shift-Share yang dilakukan diperoleh bahwa struktur ekonomi di semua SWP didominasi oleh sektor tertier, kemudian primer dan sekunder. Sektor dominan kontribusinya terhadap PDRB masing-masing SWP adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan serta hotel dan restoran. Berdasarkan analisis Skalogram, Daya saing dan Jarak yang dilakukan maka diperoleh gambaran masing-masing pusat pertumbuhan pada setiap SWP yakni ; 1) Kecamatan Ngantang merupakan kecamatan prioritas untuk SWP I; 2) Kecamatan Singosari merupakan kecamatan prioritas untuk SWP II Utara; 3) Kecamatan Pakisaji merupakan kecamatan prioritas untuk SWP II Selatan ; 4) Kecamatan Poncokusumu merupakan kecamatan prioritas untuk SWP IV; 5) Kecamatan Kepanjen merupakan kecamatan prioritas untuk SWP V; 6) Kecamatan Pagelaran merupakan kecamatan prioritas untuk SWP VII; 7) Kecamatan Turen merupakan kecamatan prioritas untuk SWP VIII.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin (2008) dengan judul “Penetapan Kawasan Andalan dan “Leading Sektor” Sebagai Pusat Pertumbuhan Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Timur”. Analisis yang digunakan adalah analisis Tipologi Klassen, analisis LQ, analisis SIG. Dari hasil analisis Tipologi Klassen diperoleh daerah yang berkembang cepat adalah Kota Surabaya, Kota Malang, Kota

Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bojonegoro. Daerah yang tergolong maju adalah Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Sumenep. Daerah yang berkembang cepat tetapi dengan pendapatan yang rendah adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Bangkalan. Sementara, daerah yang relatif tertinggal adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan analisis LQ yang dilakukan, maka yang menjadi sektor unggulan adalah pertanian disusul listrik, gas dan air bersih, bangunan, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, angkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian. Dengan hasil penggabungan antara LQ dan penggunaan SIG didapati yang menjadi daerah pusat pertumbuhan di Koridor Utara Selatan adalah Kota Surabaya dan Kota Malang, untuk Koridor Barat Daya adalah Kota Kediri dan Kota Madiun, selanjutnya kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan di

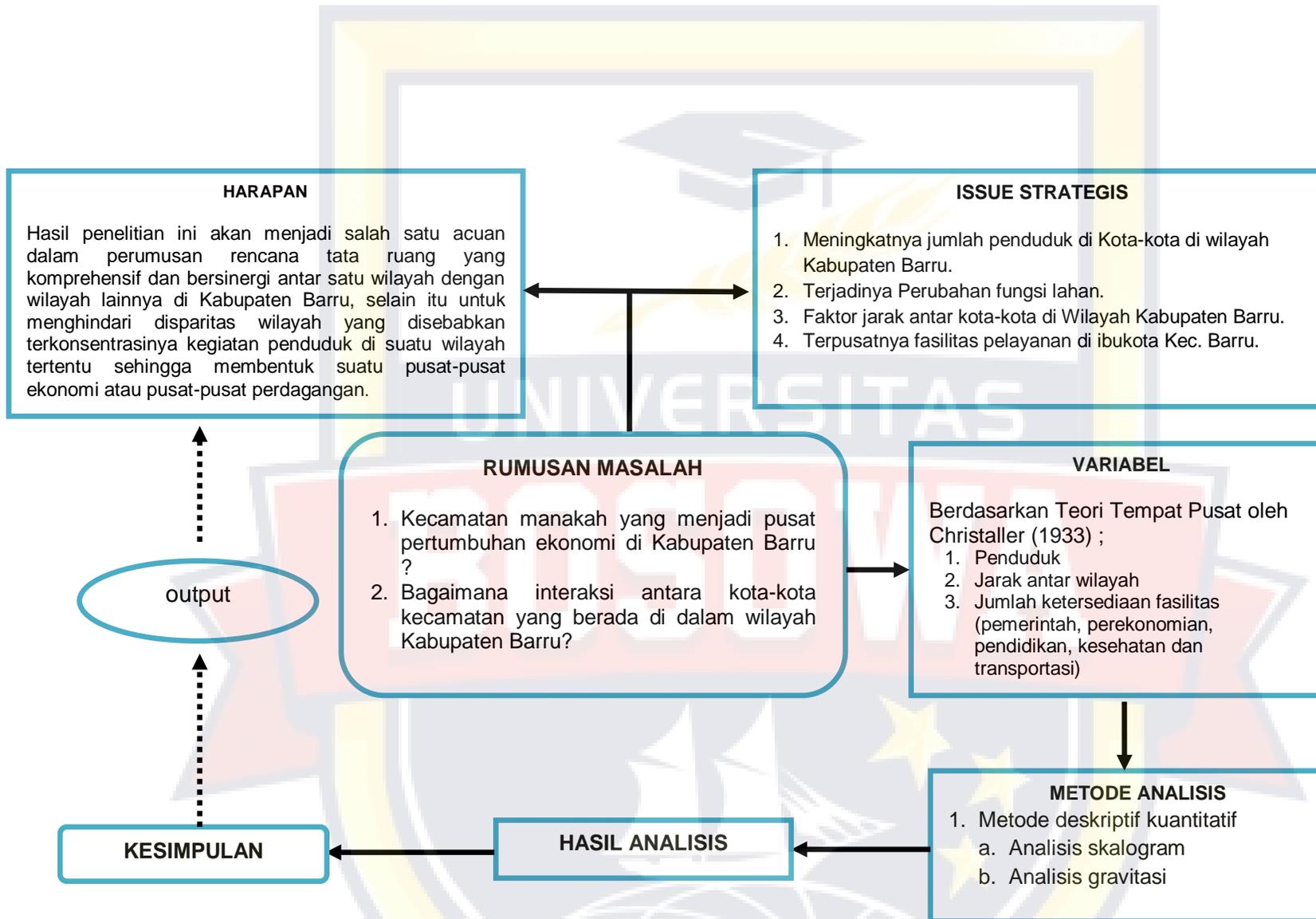
Koridor Timur adalah Kabupaten Jember dan Kota Probolinggo serta di Koridor Utara adalah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep.

Pandapotan T.P Nainggolan meneliti tentang Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun. Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 12. Menggunakan metode analisis skalogram dan indeks sentralitas untuk menentukan pusat pertumbuhan, serta menggunakan analisis gravitasi untuk mengukur daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah atau besarnya interaksi antar daerah. Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas yang dilakukan dengan menggunakan 30 jenis fasilitas yang dijadikan sebagai indikator terdapat 5 kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan pusat pertumbuhan yaitu : Kecamatan Siantar, Bandar, Tanah Jawa, Raya dan Bosar Maligas. Kelima kecamatan tersebut memiliki nilai sentralitas yang lebih tinggi dari kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil analisis gravitasi menunjukkan bahwa kecamatan pusat pertumbuhan Siantar memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Gunung Malela sebagai wilayah hinterlandnya. Kecamatan pusat pertumbuhan Bandar memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Pematang Bandar. Kecamatan Tanah Jawa sebagai kecamatan pusat pertumbuhan memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Hatonduhan.

Kecamatan pusat pertumbuhan selanjutnya yakni Kecamatan Raya memiliki interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Panei sebagai kecamatan hinterlandnya. Dan kecamatan pusat pertumbuhan Bosar Maligas memiliki hubungan interaksi yang paling kuat dengan Kecamatan Bandar. Selain hubungan interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan wilayah hinterlandnya, terdapat juga intraksi sesama kecamatan pusat pertumbuhan. Kecamatan pusat pertumbuhan yang memiliki hubungan interaksi dengan sesama kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Tanah Jawa dengan Siantar dan Kecamatan Bandar dengan Bosar Maligas.

G. Kerangka Pikir.

Dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan awal, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisa serta menentukan hasil keluaran akhir (*output*). Untuk itu diperlukan sebuah kerangka pikir yang dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini. Kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2. mengenai kerangka dasar dan alur pemikiran. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 3.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Nazir (1988: 51), metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian statistik deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berorientasi data statistik yang diambil dari instansi-instansi yang berwenang mengeluarkan atau menyediakan data statistik yang diinginkan untuk dianalisis demi keperluan penelitian. Misalnya data jumlah penduduk, jarak antar ibukota kecamatan dalam satu wilayah (kabupaten/kota), jumlah fasilitas sosial, ekonomi, pemerintahan dll.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian berada di kota-kota sekitar wilayah Kabupaten Barru, yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa :

1. Kota-kota yang berada di dalam dan di sekitar wilayah Kabupaten Barru memiliki kesamaan struktur masyarakat

(sosial budaya), saling ketergantungan antar kota-kota (mobilitas ekonomi) dan aksesibilitas yang tergolong cukup mudah.

2. Penentuan Kota Tobelo sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Barru .
3. Berdasarkan alasan diatas maka peneliti ingin mengetahui pengaruh kota-kota yang berada di dalam wilayah Kabupaten Barru ditinjau dari segi fungsi pelayanannya.

C. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Data Kuantitatif

Adalah data yang nilainya dalam bentuk angka. Adapun jenis data yang dimaksud adalah jumlah dari kepadatan penduduk, luas wilayah dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

b) Data Kualitatif.

Adalah data yang bernilai bukan angka. Adapun jenis data tersebut meliputi kondisi sarana dan prasarana, pola penggunaan lahan, kondisi fisik wilayah dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data.

Adapun sumber data tersebut didapatkan dengan melakukan survey lapangan dan survey pada instansi terkait. Sumber data yang menjadi input penelitian ini adalah Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait seperti BPS, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Desa dan Sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni:

1. Pendataan instansional, mengumpulkan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif obyek penelitian.
2. Telaah pustaka, peneliti mempelajari data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif melalui sumber dokumen (Laporan, Monografi Daerah, Buku-buku, dan lainnya).
3. Dokumentasi, merupakan suatu proses pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

E. Variabel Penelitian.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tinjauan Teori Christaller (1933) pada Bab II (tinjauan pustaka), untuk mengetahui peran dan fungsi Kota Tobelo sebagai

pusat pertumbuhan di Kabupaten Barru, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara teoritis berpengaruh. Adapun variabel yang digunakan berdasarkan teori adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk.
2. Jarak antar wilayah.
3. Jumlah ketersediaan fasilitas (pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan transportasi).

F. Metode Analisis.

Metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menganalisis variabel yang berhubungan dengan menggunakan alat analisis (rumus) statistik dan matematis secara jelas akurat untuk menjawab pertanyaan.

Alat analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis Skalogram.

Hoover (1948) dalam Sihotang, (2001) menjelaskan bahwa salah satu indikator suatu daerah dapat dikategorikan sebagai pusat kegiatan / pertumbuhan ekonomi adalah memiliki keuntungan konsentrasi perkotaan yang meliputi diantaranya fasilitas-fasilitas komersial, perbankan dan finansial, transportasi, komunikasi, adanya fasilitas-fasilitas sosial, hiburan dan keuntungan skala dalam pelayanan umum oleh pemerintah.

Tujuan digunakannya analisis *scalogram* adalah untuk mengidentifikasi kota-kota kecamatan yang dapat dikelompokkan

menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang tersedia. Kemampuan suatu kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi didasari atas ketersediaan atas fasilitas perkotaan yang dimiliki. Dalam analisisnya klasifikasi kota dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama yaitu (Blakeley, 1994) :

a) **Differentiation** adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja.

b) **Solidarity** adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*benefit oriented*).

c) **Centrality** adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan

hierarkhi dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolah, kantor pemerintahan dan sejenisnya.

Selain itu untuk melihat apakah konsentrasi pada suatu tempat dapat dikatakan sebagai kota atau tidak, adalah dari seberapa banyak jenis fasilitas perkotaan yang tersedia dan seberapa jauh kota tersebut menjalankan fungsi perkotaan. (Tarigan, 2005). Adapun fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan tersebut meliputi :

- 1) Pusat Perdagangan, yang tingkatannya dapat dibedakan atas melayani masyarakat kota itu sendiri, melayani masyarakat kota atau daerah pinggiran (daerah yang berbatasan) atau melayani beberapa kota kecil (pusat Kabupaten).
- 2) Pusat pelayanan jasa baik jasa perseorangan maupun jasa perusahaan.
- 3) Tersedianya prasarana perkotaan, yang menunjang kehidupan seperti adanya sistem jalan kota yang baik, listrik, jaringan telepon, air minum, taman kota maupun pasar.
- 4) Pusat penyediaan fasilitas sosial dan sarana pendidikan.
- 5) Pusat pemerintahan, banyak kota yang sekaligus merupakan lokasi pusat pemerintahan. Hal ini terjadi karena pusat pertumbuhan turut mempercepat tumbuhnya suatu

kota karena banyak masyarakat yang merasa perlu datang ke tempat itu untuk urusan pemerintahan

- 6) Pusat komunikasi dan pangkalan transportasi artinya dari kota tersebut masyarakat bisa berhubungan ke banyak tujuan dengan berbagai pilihan alat penghubung.
- 7) Lokasi pemukiman yang tertata, suatu lokasi/daerah dapat dikatakan sebagai sebuah kota karena jumlah penduduknya banyak. Penduduk membutuhkan tempat tinggal. Hal ini berarti kota dapat sekaligus menjadi tempat pemukiman

Oleh karena itu menurutnya, makin banyak fungsi atau fasilitas yang dimiliki suatu daerah, menggambarkan hierarki yang sebenarnya dari kota tersebut dan apabila makin tinggi hierarki dari kota tersebut maka makin luas daerah pengaruhnya sehingga dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan.

Tujuan digunakannya analisis *scalogram* adalah untuk mengidentifikasi kota-kota kecamatan-kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang tersedia. Kemampuan suatu kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi didasari atas ketersediaan atas fasilitas perkotaan yang dimiliki (Blakeley, 1994). Dalam analisis ini, klasifikasi fasilitas perkotaan dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama yaitu fasilitas Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan.

Adapun penghitungan dengan menggunakan alat analisis *scalogram* ini, dapat menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut (Nahrawi, 2004) :

- a) Fasilitas perkotaan (ekonomi, sosial, ekonomi-politik/pemerintahan) yang terdiri dari komponen fasilitas perbankan, pasar, pertokoan, telekomunikasi, terminal dan lain-lain. Masing-masing komponen tersebut dapat dipecah lagi dalam beberapa kelas sesuai kebutuhan didasarkan atas skala pelayanan, Jumlah tenaga kerja atau tolak ukur lain yang sesuai dengan spesifikasi dari komponen yang bersangkutan.
- b) Masing-masing komponen fasilitas yang berdiri sendiri, skornya ditetapkan tidak tergantung antara komponen satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh komponen yang satu tidak berkaitan dengan komponen yang lainnya.
- c) Nilai dari masing-masing komponen fasilitas ditentukan nilai yang bulat serta kecil dan nilai tersebut merupakan penggabungan dari nilai kelas-kelas komponen fasilitas.
- d) Nilai yang berlaku sama bagi komponen fasilitas yang tersebar pada kecamatan-kecamatan yang diteliti. Hal ini menekankan bahwa penetapan nilai tidak akan mempunyai

pengaruh yang berbeda terhadap perolehan skor pada masing-masing kecamatan.

e) Perbedaan yang diberikan pada masing-masing kelas menunjukkan adanya perbedaan pelayanan yang mampu diberikan kelas tersebut.

Dari tahapan-tahapan tersebut maka, masing-masing fasilitas utama diberikan skor 10, pemberian skor dan pembagian kelas disesuaikan dengan tingkatan spesifikasi dari fasilitas yang dimiliki. Apabila tidak ada tingkatan dalam kelas tersebut nilai totalnya adalah 10; jika ada dua tingkat, nilai tertinggi 6, dan nilai terendah adalah 4; jika dalam kelas tersebut terdapat tiga tingkatan maka pembagiannya nilai tertinggi 5, nilai sedang 3, serta nilai terendah 2. Khusus untuk kelas yang terdiri dari lima tingkat nilai totalnya adalah 15, dengan nilai tertinggi dan nilai masing-masing adalah 4, 3, 2 dan nilai terendah adalah 1. Perhitungan ini berlaku untuk semua fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan masing-masing dijumlahkan dan dikalikan dengan banyaknya (kuantitas) yang tersedia dan dianalisis secara terpisah. Setelah dilakukan analisis semua fasilitas tersebut dijumlahkan dan dianalisis sebagai suatu kesatuan (Pebrina, 2005 : 23)

$$TNF = SF \times Q \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

TNF = Total nilai fasilitas

SF = Score Fasilitas

Q = Kuantitas/Jumlah

Semakin tinggi jumlah nilai total yang dimiliki oleh kecamatan tersebut maka kecamatan tersebut akan mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan.

2. Analisis Gravitasi.

Model gravitasi ini adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal (Tarigan, 2005). Artinya, model gravitasi ini dapat berfungsi ganda dalam penggunaannya. Karena dapat juga dipakai untuk teori lokasi yang akan digunakan, sebagai alat dalam perencanaan.

Perumusan ini dibuat berdasarkan pengamatan terjadi. Misalnya, ada dua kota (kota 1 dan kota 2) yang saling

berdekatan, jika kita ingin mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi pada dua kota tersebut. Maka kita dapat saja melihat dari banyaknya jumlah perjalanan yang terjadi pada dua kota tersebut. Namun masalahnya dalam jumlah perjalanan tersebut kita harus mengetahui, faktor-faktor apa saja yang menentukan besarnya interaksi tersebut. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tarigan (2005), interaksi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, dan faktor pertama yang menentukan adalah besarnya kota. Karena dipengaruhi oleh besarnya kota tersebut, maka model ini masih berkaitan dengan analisis *scalogram* yang dipakai untuk menentukan besarnya kota atau pusat pertumbuhan.

Sedangkan faktor kedua yang mempengaruhi adanya interaksi tersebut adalah jarak antar kota. Jarak antar kota dapat mempengaruhi keinginan/minat orang untuk bepergian. Hal ini terjadi karena dengan adanya jarak yang makin jauh ditempuh oleh orang maka jumlah waktu dan biaya yang dikeluarkan akan semakin besar dan akan membuat pengeluaran yang digunakan dalam perjalanan tersebut akan semakin mahal tentunya hal ini dalam kondisi normal berdampak terhadap menurunnya keinginan orang tersebut untuk bepergian.

Rumus gravitasi digunakan untuk menganalisis daya tarik atau kekuatan interaksi. Pada perkembangannya variabel yang sering digunakan untuk mengetahui daya tarik atau kekuatan

interaksi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk dan jarak kedua daerah tersebut. Rumus gravitasi yang pada umumnya digunakan tersebut dapat disederhanakan menjadi (Daldjoeni dalam Ermawati, 2010:51) :

$$I = \frac{P1 \times P2}{d2}$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara kota/wilayah A dan B

P1 = jumlah penduduk kota/wilayah i (ribuan jiwa)

P2 = jumlah penduduk kota/wilayah j (ribuan jiwa)

d2 = jarak antara daerah i dan j (Km)

Semakin besar angka interaksi yang diperoleh oleh suatu wilayah maka semakin erat hubungan wilayah tersebut dengan daerah lainnya. Dalam hal ini berarti semakin potensial daerah tersebut untuk berkembang karena keterkaitan antar kegiatan ekonominya erat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Barru.

1. Aspek Fisik Dasar.

a. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara $4^{\circ}05'49''$ LS $4^{\circ}47'35''$ LS dan $119^{\circ}35'00''$ BT - $119^{\circ}49'16''$ BT,

Secara geografis Kabupaten Barru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pangkajene Kepulauan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Barru terletak di pantai barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km dari Kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Barru adalah $1.174,72 \text{ km}^2$ yang meliputi Kecamatan Tanette Riaja seluas $79,17 \text{ km}^2$, Kecamatan Barru seluas $199,22 \text{ km}^2$, Kecamatan Soppeng Riaja seluas $78,90 \text{ km}^2$ Kecamatan Mallusetasi $216,58 \text{ km}^2$ Kecamatan

Pujananting seluas 314,26 km² Kecamatan Balusu seluas 112,20 km².

b. Jarak Antar Wilayah di Kabupaten Barru.

Secara administrasi Kabupaten Barru terdiri dari tujuh kecamatan, dan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Barru (ibukota Kabupaten) atau lebih tepatnya berada di Mengempang. Aksesibilitas di wilayah Kabupaten Barru sangat bervariasi, hal ini dikarenakan topografi dan kondisi fisik wilayah yang datar di sekitar ibukota Kabupaten serta bergelombang sampai pada pegunungan menuju arah Kabupaten Soppeng. Berikut tabel 4.1 data jarak antar wilayah di Kabupaten Barru dirinci menurut desa (kelurahan) :

Tabel 4.1 Jarak Antar Ibukota ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru.

No	Ibukota Kabupaten	Ibukota Kecamatan	Jarak (km)
1	Barru	Kec. Barru	0
2	Barru	Pujananting	21,21
3	Barru	Tanete Riaja	17,16
4	Barru	Tanete Rilau	9,27
5	Barru	Sopeng Riaja	16,36
6	Barru	Mallusetasi	24,61
7	Barru	Balusu	9,39

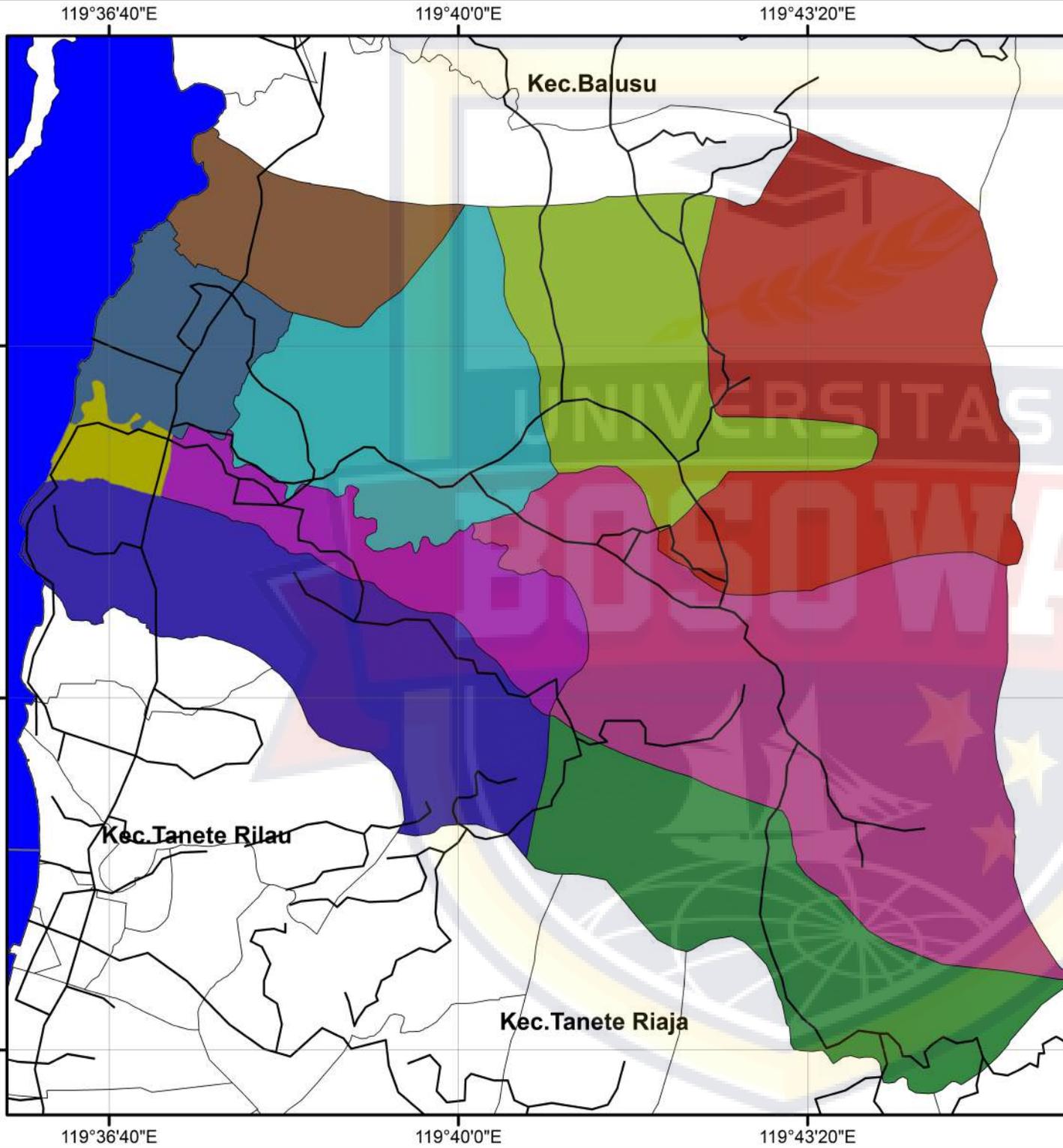
Sumber : Analisis GIS, 2018.

Berikut peta administrasi Kabupaten Barru ditunjukkan dalam gambar 4.1 berikut ini :





GAMBAR 4.1
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BARRU



Judul Skripsi :

Judul Gambar :

**PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN BARRU**

Skala :



1:100.000

0 750 1.500 3.000 4.500 6.000 Meters

Legenda :

— Jalan

■ Laut

DESA/KELURAHAN

■ ANABANUA

■ S.BINANGAE

■ COPPO

■ SEPEE

■ GALUNG

■ SIAWUNG

■ MANGEMPANG

■ TOMPO

■ PALAKKA

■ TUWUNG

Mahasiswa / Stambuk :

Desen :

Sumber :

1. Peta RTRW Kabupaten Barru
2. Peta Administrasi Kec Barru
3. Peta Potensi Desa (PODES)



Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar
2018

c. Kondisi Topografi dan Kelerengan.

Secara morfologi, kondisi topografi Kabupaten Barru cukup bervariasi yaitu Dataran, Pantai, Perbukitan dan Pegunungan dengan kelerengan yang bervariasi dari 0-2% hingga >40%. Sedangkan ketinggian di atas permukaan laut (DPL) tercatat mulai dari 0-25 mdpl hingga >1.500 mdpl.

d. Jenis Tanah.

Jenis tanah di Kabupaten Barru terdiri dari jenis tanah aluvial seluas 14,659 km² (12,48%), litosol seluas 29,043 km² (24,72%), regosol seluas 41,254 km² (35,12%) dan jenis mediterania mencakup 32,516 km² (27,68%).

e. Kondisi Klimatologi.

Keadaan Iklim di Kabupaten Barru hampir sama dengan beberapa Kabupaten pada umumnya dan memiliki suhu udara berkisar antara 20 °C – 36 °C. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni dan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dengan rata-rata curah hujan antara 200 – 300 mm per tahun.

f. Kondisi Hidrologi.

Secara hidrologi Kabupaten Barru memiliki kondisi kedalaman air tanah yang terbagi antara tiga kategori, yaitu <10 meter, antara 10-25 meter, dan antara 25-100 meter.

2. Aspek Kependudukan.

a. Jumlah Penduduk Tahun 2016.

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru pada tahun 2017 adalah 172.767 jiwa, yang terdiri dari 83.082 jiwa laki-laki dan 89.685 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kab. Barru Tahun 2017.

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk (jiwa)
1	Tanete Riaja	10.790	11.949	22.739
2	Tanete Rilau	16.335	17.438	33.773
3	Barru	19.857	21.221	41.078
4	Soppeng Riaja	8.634	9.265	17.899
5	Mallusetasi	12.197	13.352	25.549
6	Pujananting	6.447	6.653	13.100
7	Balusu	8.822	9.807	18.629
Jumlah Total		83.082	89.685	172.767

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa distribusi atau tingkat persebaran penduduk sangat terpusat di Kecamatan Barru . Akan tetapi secara keseluruhan relatif tersebar merata di setiap kecamatan, hal ini disebabkan sebaran infrastruktur yang juga tersebar hampir merata di Kabupaten Barru.

Dengan luas wilayah daratan 1.174,72 km² dan jumlah penduduk sebanyak 172.767 jiwa maka kepadatan penduduk Kota Kabupaten Barru pada tahun 2017 sebesar 147,07 jiwa/km². Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Di Kabupaten Barru Tahun 2017.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Tanete Riaja	22.739	174,29	14,84	130,46
2.	Tanete Rilau	33.773	79,17	6,74	426,58
3.	Barru	41.078	199,32	16,97	206,09
4.	Soppeng Riaja	17.899	78,90	6,72	226,85
4.	Mallusetasi	25.549	216,58	18,44	117,96
6.	Pujananting	13.100	314,26	26,74	41,68
7.	Balusu	18.629	112,20	9,55	166,03
Jumlah Total		172.767	1174,72	100	147,07

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2018.

Sedangkan banyaknya rumah tangga di kabupaten barru adalah berjumlah 41.070 yang tersebar di tujuh (7) kecamatan. Dengan rata-rata anggota dalam keluarga adalah empat (4) jiwa. Berikut disajikan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut :

Tabel 4.4 jumlah rumah tangga dan anggota keluarga dirinci per kecamatan di Kabupaten Barru.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Anggota Keluarga
1.	Tanete Riaja	22.739	4
2.	Tanete Rilau	33.773	4
3.	Barru	41.078	4
4.	Soppeng Riaja	17.899	4
4.	Mallusetasi	25.549	4
6.	Pujananting	13.100	4
7.	Balusu	18.629	4
Jumlah Total		172.767	4

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2018

B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Barru .

Kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau walikota yang melingkupi batas-batas wilayahnya. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain (BPS Kab. Barru, 2018).

1. Aspek Fisik Dasar.

a. Letak Geografis dan Administrasi.

Luas wilayah Kecamatan Barru tercatat 199,32 Km² yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) Desa. Kecamatan Barru

berada pada kemiringan 0-2% sampai >40%. Batasan-batasan administratif Kecamatan Barru sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Tanete Riaja
- Sebelah Timur : Kec. Tanete Rilau
- Sebelah Selatan : Kab. Pare-pare
- Sebelah Barat : Selat Makassar

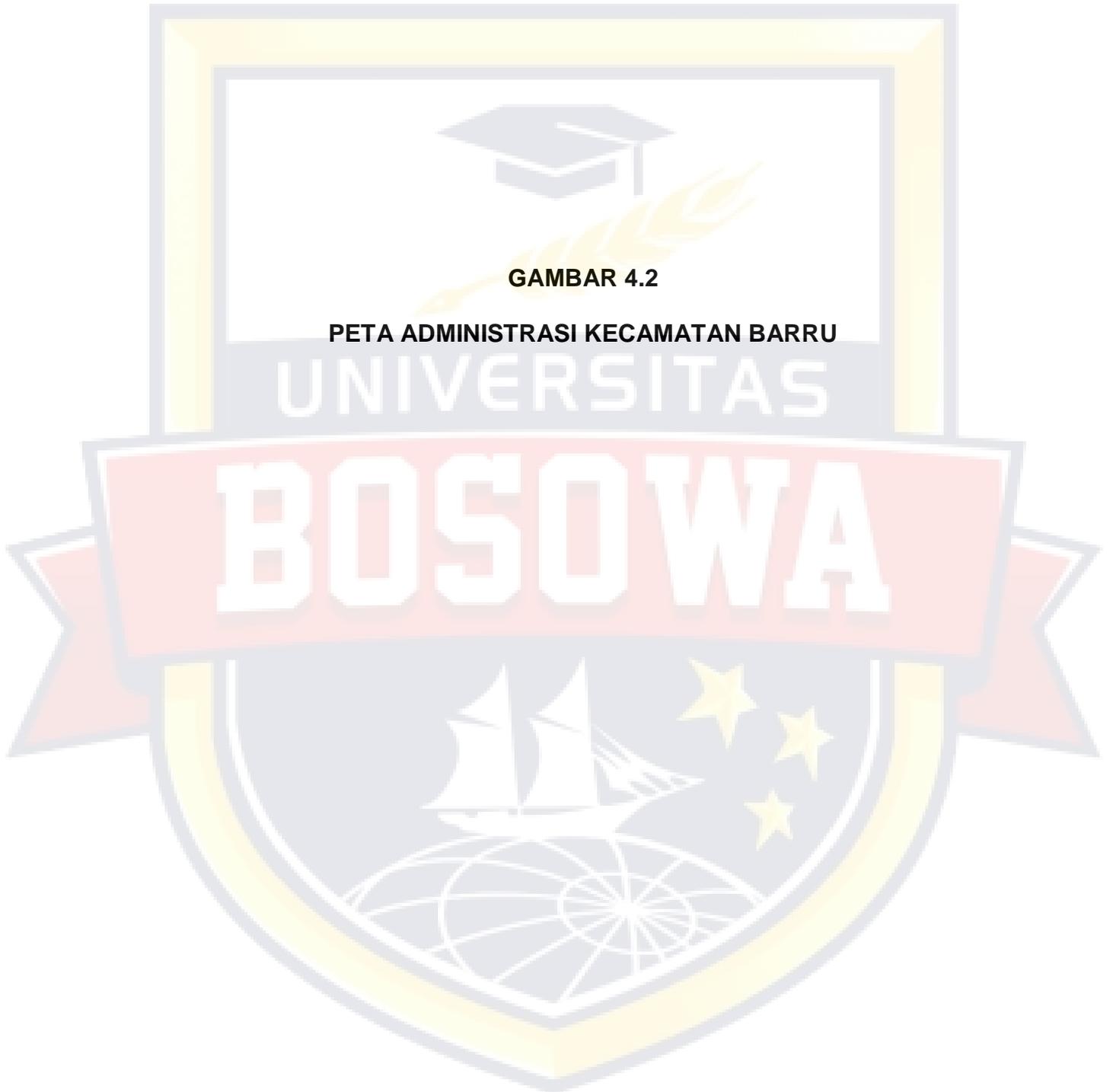
Desa dengan luasan terbesar berada di Desa Palakka yaitu 36,33 Km² (3%) sedangkan yang paling kecil yaitu desa Sumpang Binangae seluas 1,80 Km² (0,15%) dari total luas keseluruhan Kabupaten Barru. Untuk lebih jelas tentang profil Kecamatan Barru , dapat dilihat pada peta administrasi Kecamatan Barru , sebagai berikut :

GAMBAR 4.2

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BARRU

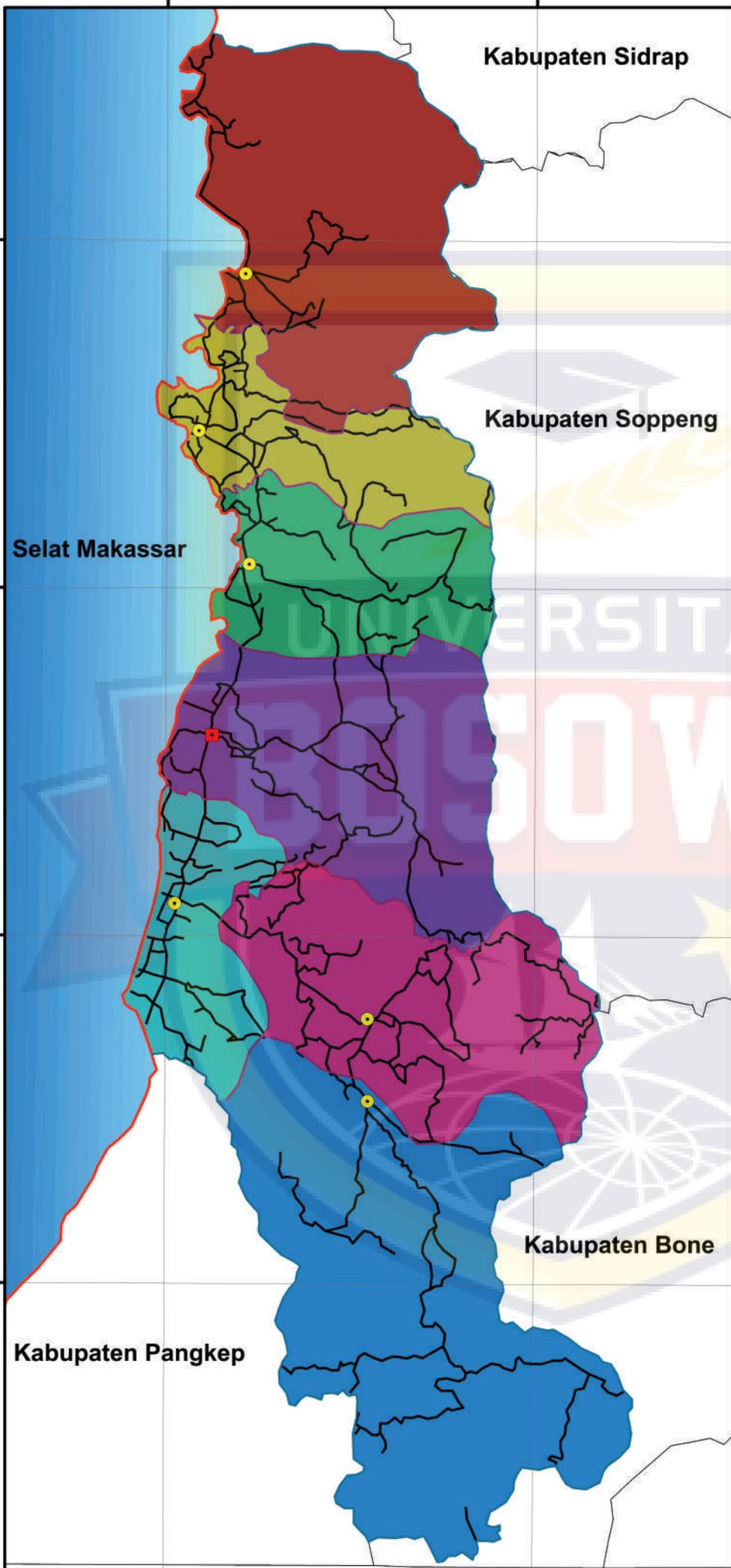
UNIVERSITAS

BOSOWA



119°36'0"E

119°46'30"E



Judul Skripsi :

Judul Peta :
Administrasi Kabupaten Barru

Skala :



1:300.000

0 1.8753.750 7.500 11.250 15.000
Meters

Legenda :

- Kota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Garis Pantai
- Jalan
- Laut

Kecamatan

- Balusu
- Barru
- Mallusetasi
- Pujananting
- Sopeng Riaja
- Tanete Riaja
- Tanete Rilau

Mahasiswa / Stambuk :

Nama Dosen :

Sumber :

1. Peta RTRW Kabupaten Barru
2. Peta Admisistrasi Kabupaten Barru



Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar
2018

119°36'0"E

119°46'30"E

4°10'0"S

4°10'0"S

4°20'0"S

4°20'0"S

4°30'0"S

4°30'0"S

4°40'0"S

4°40'0"S

b. Topografi dan Kelerengan.

Berdasarkan data topografi, Kecamatan Barru berada pada ketinggian antara 0 sampai 1.500 mdpl. Sementara, kondisi kemiringan lereng berkisar antara 0 - 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara topografi wilayah Kecamatan Barru berada pada posisi datar hingga pegunungan.

c. Geologi dan Jenis Tanah.

Secara geologi, jenis batuan di Kecamatan Barru terdiri dari jenis formasi bentukan batuan satuan aluvial. Sedangkan jenis tanah terdiri dari tanah regosol, litosol dan mediterania.

d. Klimatologi.

Secara klimatologi Kecamatan Barru terletak pada posisi iklim musim timur yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan (bulan basah) yang jatuh antara bulan Juni-September dan musim kemarau (bulan kering) yang berlangsung pada periode Januari-Mei. Jumlah hari hujan mencapai 165 hari per tahun, sedangkan curah hujan mencapai 3.392 mm per tahun, dengan suhu udara rata - rata berkisar antara 26°C - 36°C.

e. Hidrologi.

Secara hidrologi Kecamatan Barru terdapat air permukaan dan air bawah tanah yang dapat digunakan dan

telah di gunakan oleh sebagian warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kedalaman air tanah di Kecamatan Barru berada antara >4 - 40 meter. Selain itu terbentang enam (6) sungai yang ikut membelah wilayah Kabupaten Barru, salah satunya Sungai Jampue sepanjang 20 km dengan ketinggian DAS (*heigth*) mencapai 4,5 m dan kerendahan DAS (*depth*) mencapai 3 m, berlokasi atau mengalir Kecamatan Barru .

2. Aspek Kependudukan.

Kecamatan Barru terbagi atas 10 Desa dengan jumlah penduduk 41.078 jiwa, yang terdiri dari 19.857 jiwa laki-laki dan 21.221 jiwa perempuan. Selain itu di Kecamatan Barru memiliki Desa-Desa yang juga termasuk kategori sebagai desa swasembada. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Barru Tahun 2017

No.	Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sumpang Binangae	5.026	5.508	10.534
2	Coppo	2.473	2.621	5.094
3	Tuwung	2.039	2.160	4.199
4	Anabanua	961	1.031	1.992

5	Palakka	1.497	1.628	3.125
6	Galung	988	1.096	2.084
7	Tompo	1.118	1.166	2.284
8	Sepee	1.470	1.623	3.093
9	Mangempang	2.893	2.994	5.887
10	Siawung	1.365	1.421	2.786
JUMLAH		19.830	21.248	41.078

Sumber : Kecamatan Barru Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.5 Tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Barru menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah Desa Sumpang Binangae yaitu 10.534 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.026 jiwa dan perempuan sebanyak 5.508 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Desa Anabanua yaitu 1992 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 961 jiwa dan perempuan sebanyak 1.031 jiwa.

Tabel 4.6 Banyaknya Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Barru dirinci per Desa/Kelurahan Tahun 2017

NAMA DESA	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3
Sumpang Binangae	45	231	156	2	16	5	0	0
Coppo	68	77	127	5	19	12	0	0
Tuwung	460	361	39	1	28	8	0	0
Anabanua	69	54	35	1	3	6	0	0
Palakka	87	119	102	1	4	10	0	0
Galung	284	130	214	11	1	7	0	0
Tompo	742	178	219	4	5	11	0	0
Sepee	210	101	77	10	5	6	0	0
Mangempang	237	177	160	6	9	15	2	0
Siawung	206	209	316	4	6	63	0	0
TOTAL	2.408	1.637	1.445	45	96	143	2	0

Sumber : BPS Kecamatan Barru , Tahun 2018.

Tabel 4.6 Tentang banyaknya penduduk berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan di Kecamatan Barru dirinci per desa/kelurahan menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tingkat SD sebanyak 2.408 jiwa, dan yang paling sedikit adalah penduduk dengan pendidikan S2 (Magister) yaitu sebanyak dua (2) orang.

Selain data banyaknya penduduk dengan karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan, disajikan juga data banyaknya penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kecamatan Barru dirinci per Desa/Kelurahan. Data disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7 Banyaknya Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Barru Tahun 2017

No	NAMA DESA	PENGANGGURAN	IBU RUMAH TANGGA	PNS	PETANI DAN PERKEBUNAN	NELAYAN	SOPIR	KARYAWAN SWASTA	HONORER
1	Sumpang Binangae	1.161	1.275	22	0	42	6	216	151
2	Coppo	1.547	675	19	0	73	19	106	99
3	Tuwung	520	450	16	264	0	11	47	33
4	Anabanua	225	104	8	114	0	0	2	8
5	Palakka	387	161	7	148	0	0	3	0
6	Galung	540	682	18	230	0	16	144	104
7	Tompo	1.197	218	18	44	0	18	42	23
8	Sepee	626	131	31	194	0	14	58	27
9	Mangempang	119	279	25	27	0	32	2	0
10	Siawung	315	215	11	230	0	3	32	21
	JUMLAH	6.637	4.190	175	1251	115	119	652	466

Sumber : Kecamatan Barru Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.5 Tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kecamatan Barru menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran dengan jumlah 7.810 orang. Sedangkan karakteristik penduduk dengan tingkat pekerjaan yang paling sedikit adalah sopir sebanyak 50 orang, yang semuanya terdiri dari laki-laki.

Tabel 4.6 Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Barru Tahun 2017

No	Desa	Penduduk	Rumah Tangga
1	Sumpang Binangae	10.534	2.357
2	Coppo	5.095	1.215
3	Tuwung	4.199	1.009
4	Anabanua	1.992	461
5	Palakka	3.125	741
6	Galung	2.083	474
7	Tompo	2.284	566
8	Sepee	3.093	749
9	Mangempang	5.887	1.292
10	Siawung	2.786	668
Jumlah		41.078	9.532

Sumber : Kecamatan Barru Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.6 Tentang jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Barru menunjukkan bahwa, jumlah rumah tangga terbanyak yaitu di Desa Anabanua, dengan 1.275 rumah tangga (KK), sedangkan paling sedikit yaitu di desa Sumpang Binangae dengan jumlah rumah tangga sebanyak 79 KK.

C. Gambaran Mikro Lokasi Penelitian.

Karena tema besar dalam penelitian ini tentang pusat pertumbuhan, dimana tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana peran dan fungsi Kota Barru sebagai Ibukota Kabupaten Barru. Untuk itu maka, secara kuantitas perlu ada kajian ilmiah atau analisis tentang ketersediaan fasilitas perkotaan, dimana banyaknya fasilitas (sarana) perkotaan menjadi data penting yang perlu untuk dikaji secara ilmiah dengan sebuah pendekatan (metode analisis). Selain itu untuk mengetahui bagaimana interaksi wilayah di Kabupaten Barru, maka data jarak antar wilayah kecamatan dengan Ibukota Kabupaten (Kota Barru) perlu untuk dikaji (dianalisis) sesuai kajian teoritis.

Dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan penelitian maka, data ketersediaan fasilitas perkotaan, baik fasilitas ekonomi, sosial, perkantoran dan transportasi di Kabupaten Barru, perlu untuk disajikan. Data jarak antar ibukota Kecamatan di wilayah penelitian juga akan disajikan dalam data statistik (tabulasi) berikut ini :

1. Data Jumlah Fasilitas Perkotaan Di Kabupaten Barru Dirinci Per Kecamatan.

Fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan menjadi infrastruktur kota yang saling berhubungan, dalam melayani kebutuhan masyarakat kota maupun di sekitar kota. Kota

merupakan tempat-tempat pusat sebagai suatu tempat yang menyediakan barang dan jasa-jasa bagi penduduk daerah belakangnya. Untuk itu maka, ketersediaan fasilitas perkotaan sangat penting adanya dalam melayani penduduk kota dan wilayah belakangnya (*Hinterland*). Berikut jumlah fasilitas ekonomi, sosial dan pemerintahan yang ada di Kabupaten Barru dirinci per Kecamatan sebagai berikut :

a. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Barru.

Tabel 4.7. Jumlah Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Barru Tahun 2017

Kecamatan	Fasilitas Pendidikan					Total
	TK/PAUD	SD/MIN/MIS	SLTP/MTs	SLTA/SMK/M. Aliyah	Perguruan Tinggi	
Tanete Riaja	4	6	3	2	0	15
Tanete Rilau	3	2	2	1	0	8
Barru	10	7	12	5	1	35
Soppeng Riaja	7	4	5	5	0	21
Mallusetasi	5	6	3	2	0	16
Pujananting	3	4	2	1	0	10
Balusu	8	4	3	1	0	16
Tanete Riaja	7	7	6	2	0	22
Total	47	40	36	19	1	143

Sumber : BPS Kab. Barru, 2018 (diolah).

Tabel 4.7 menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Barru, total jumlah fasilitas sebanyak 143 unit, yang tersebar di 7 Kecamatan. Terdapat lima (5) jenis fasilitas

pendidikan yaitu TK/PAUD, SD/MIN/MIS, SLTP/MTs, SLTA/SMK/Madrasah Sederajat dan Perguruan Tinggi.

b. Jumlah Fasilitas Kesehatan.

Tabel 4.8. Jumlah Fasilitas Kesehatan
Di Kabupaten Barru Tahun 2017

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan					Total
	RS	Poliklinik/Balai Kesehatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	
Tanete Riaja	0	0	1	2	0	3
Tanete Rilau	0	0	1	1	1	3
Barru	1	4	6	2	2	15
Soppeng Riaja	0	0	2	0	3	5
Mallusetasi	0	2	1	0	0	3
Pujananting	0	2	2	1	2	7
Balusu	1	0	5	1	2	9
Total	2	8	18	7	10	45

Sumber : BPS Kab. Barru, 2018 (diolah).

Tabel 4.8 menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Barru, total jumlah fasilitas sebanyak 45 unit, yang tersebar di 7 Kecamatan. Terdapat lima (5) jenis fasilitas pendidikan yaitu Rumah Sakit, PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, Poliklinik dan POSYANDU.

c. Jumlah Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Fasilitas pemerintahan menjadi salah satu faktor penentu suatu kota bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maupun menjadi pusat pelayanan sosial (publik) bagi masyarakat di dalam maupun diluar kota. Jumlah ataupun banyaknya fasilitas pemerintahan di Kabupaten Barru, ditinjau per Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Jumlah Pemerintahan dan Pelayanan Publik Di Kabupaten Barru Tahun 2017

Kecamatan	Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Total
	Pemerintahan	POS	Telekomunikasi	PLN	PDAM	
Tanete Riaja	7	1	1	1	1	11
Tanete Rilau	9	0	0	1	0	10
Barru	16	1	1	1	1	20
Soppeng Riaja	7	1	0	0	0	8
Mallusetasi	5	0	1	0	1	7
Pujananting	11	0	0	0	0	11
Balusu	12	0	0	1	0	13
Total	67	3	3	4	3	80

Sumber : BPS Kab. Barru, 2018 (diolah).

Pada Tabel 4.9 diatas menggambarkan ketersediaan fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Barru, total jumlah fasilitas sebanyak 80 unit, yang tersebar di 7

Kecamatan. Kecamatan Barru merupakan Kecamatan dengan jumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik terbanyak. Sedangkan Kecamatan Malusetasi merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas Pemerintahan dan pelayanan Publik paling sedikit yaitu 7 unit.

d. Jumlah Fasilitas Perekonomian.

Fasilitas perekonomian di suatu daerah baik itu Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, menjadi vital (penting) dikarenakan aktifitas pergerakan ekonomi, sosial, penduduk tergantung ketersediaan fasilitas ataupun infrastruktur pendukung. Banyaknya fasilitas perekonomian di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.10 Jumlah Fasilitas Perekonomian Di Kabupaten Barru Tahun 2017

Kecamatan	Fasilitas Perekonomian							Total
	KUD	Non KUD	Hotel	Bandara	Terminal	Pelabuhan	Pasar	
Tanete Riaja	1	11	0	0	0	0	0	12
Tanete Rilau	2	9	0	0	0	0	0	11
Barru	1	24	23	0	1	1	2	52
Soppeng Riaja	1	12	0	0	1	0	1	15
Mallusetasi	0	10	2	0	0	0	0	12
Pujananting	1	10	0	0	0	0	1	12
Balusu	3	11	3	0	1	2	1	21
Total	9	87	28	0	3	3	5	135

Sumber : BPS Kab. Barru, 2018 (diolah).

Pada tabel 4.10 menggambarkan ketersediaan fasilitas perekonomian di Kabupaten Barru berjumlah 135 unit. Dimana Kecamatan Barru merupakan Kecamatan yang paling banyak terdapat fasilitas perekonomian sebanyak 52 unit, dibandingkan kecamatan yang lain di Kabupaten Barru.

e. Jumlah Fasilitas Peribadatan.

Tempat ibadah menjadi salah satu titik pusat masyarakat bersosialisasi, baik di desa maupun di kota. Orang muslim menjadikan tempat ibadah (Masjid/Mushola) sebagai tempat beribadah, berdakwah (syiar), bermusyawarah dan tempat untuk belajar (kajian). Banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11 Jumlah Fasilitas ibadah Di Kabupaten Barru Tahun 2017

Kecamatan	Fasilitas Ibadah					Total
	Masjid/mushola	Gereja	Vihara	Pura	Klenteng	
Tanete Riaja	22	0	0	0	0	22
Tanete Rilau	2	0	0	0	0	2
Barru	13	2	0	0	0	15
Soppeng Riaja	3	0	0	0	0	3
Malusetasi	7	0	0	0	0	7
Pujananting	7	0	0	0	0	7
Balusu	11	0	0	0	0	11
Total	65	2	0	0	0	67

Sumber : BPS Kab. Barru, 2018 (diolah).

Pada tabel 4.11 menggambarkan banyaknya fasilitas peribadatan di Kabupaten Barru berjumlah 60 unit. Dimana Masjid dan Mushola sebanyak 58 unit tersebar di 7 Kecamatan. Sedangkan jumlah Gereja 2 unit tersebar di Kecamatan Barru. Kecamatan Riaja merupakan Kecamatan yang paling banyak tersedia fasilitas peribadatan sebanyak 22 unit, sedangkan Kecamatan Tanete Rilau merupakan, wilayah yang paling sedikit memiliki fasilitas peribadatan yaitu sebanyak 2 unit Masjid dan Mushola.

D. Kedudukan Kecamatan Barru Dalam RTRW Kabupaten Barru.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan dan penetapan kawasan strategis dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, maka kawasan strategis di Kabupaten Barru terdiri atas kawasan strategis provinsi (KSP) dan kawasan strategis kabupaten (KSK). Sedangkan KSN tidak ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Barru.

1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Penetapan Kawasan Stretegis Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Barru berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Sulsel, antara lain :

a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

- 1) Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung.
- 2) Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete dan jarak.
- 3) Kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak.
- 4) Kawasan pengembangan budidaya udang meliputi tambak-tambak.

2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Barru.

Penetapan kawasan strategis tersebut di Kabupaten Barru diarahkan atas dasar kepentingan, sebagai berikut :

- Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.
- Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya.
- Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya dukung dan Lingkungan.
- Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi.

a. Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi.

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru . Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki kecenderungan pada :

- Optimalisasi potensi ekonomi cepat tumbuh
- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
- Potensi ekspor
- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
- Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru meliputi :

1. Kawasan Perkotaan Anabanua diarahkan pengembangannya sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial ekonomi, perdagangan dan jasa.

2. Kawasan agropolitan Barru di Kecamatan Barru dan di Kecamatan Tanate Riaja.

3. Kawasan Pertanian berkelanjutan di Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.

b. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya.

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, seperti :

- Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat
- Prioritas peningkatan kualitas sosial budaya
- Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan
- Tempat perlindungan peninggalan budaya
- Tempat memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya
- Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial
- Hasil cipta karya budaya masyarakat yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda budaya (*focal point, landmark*).

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sosial budaya termasuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang dapat menjadi ciri khas kota, serta sebagai daya tarik atraksi wisata budaya.

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya di Kabupaten Barru, mencakup :

- a. Kawasan Rumah Adat Kerajaan Bugis-Soppeng.
- b. Kawasan sekitar makam raja-raja Barru Bugis Soppeng.
- c. Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya dukung dan Lingkungan.**

Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya dukung dan Lingkungan, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, seperti :

- Tempat perlindungan keanekaragaman hayati
 - Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah dan atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
 - Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian
 - Kawasan rawan bencana alam
 - Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan
- d. Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi.**

Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis

pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain :

- Kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumberdaya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir.
- Memiliki sumberdaya alam yang strategis.
- Memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi, bertujuan untuk memberikan ruang bagi kegiatan pengembangan teknologi yang dapat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi bagi pembangunan di Kabupaten Barru.

E. Hasil Penelitian.

1. Analisis *Skalogram* Ketersediaan Fasilitas Perkotaan Di Kab. Barru.

Hasil penelitian memberikan informasi bahwa ada 5 (lima) jenis fasilitas yang di jadikan variabel dalam menentukan besarnya fungsi pelayanan di Kabupaten Barru. Jumlah fasilitas pelayanan yang dijadikan indikator yang tadinya 27 (duapuluh tujuh) akan

tetapi karena fasilitas Vihara, Pura dan Klenteng tidak terdapat disana maka, fasilitas yang menjadi indikator hanya berjumlah 24 (duapuluh empat) jenis fasilitas pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis *skalogram* lihat **Lampiran I**, dari 5 jenis fasilitas dan 24 indikator fasilitas perkotaan, maka tabel penentuan pusat pertumbuhan ekonomi dan penentuan Struktur Tata Ruang (hierarchy kota) Kabupaten Barru, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Hasil Tabulasi Skalogram Fasilitas Pelayanan Dalam
Menentukan Kecamatan Pusat Pertumbuhan
(Hirarki) di Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Total Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas (unit)	Total Nilai Fasilitas	Hirarki
1	Barru	22.739	24	176	4224	I
2	Balusu	18.629	21	63	1323	II
3	Tanete Riaja	41.078	15	66	675	III
4	Soppeng Riaja	17.899	16	13	48	IV
5	Tanete Rilau	33.773	9	38	342	V
6	Pujananting	13.100	8	29	232	VI
7	Malusetasi	25.549	9	20	180	VII

Sumber : Data Sekunder, diolah dan dianalisis.

Tabel 4.13 diatas memberikan gambaran bahwa ketersediaan fasilitas perkotaan di Kabupaten Barru cukup merata yang tersebar di 7 Kecamatan. Kecamatan dengan jumlah

ketersediaan fasilitas perkotaan terbanyak berada di Kecamatan Barru , yaitu sebanyak 176 unit fasilitas pelayanan. Sedangkan Kecamatan Malusetasi merupakan kecamatan dengan jumlah fasilitas perkotaan yang paling sedikit yaitu sebanyak 20 unit, dari semua jenis fasilitas pelayanan sosial, ekonomi, ekonomi pemerintahan.

Berdasarkan analisis *skalogram* menunjukkan bahwa Kecamatan Barru menempati peringkat pertama atau hirarki I dalam ketersediaan fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan pemerintahan dari 7 Kecamatan yang dianalisis. Fasilitas pelayanan yang tersedia di Kecamatan Barru adalah fasilitas pendidikan (TK/PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik, posyandu), fasilitas ekonomi (pasar, KUD, Non KUD, terminal, pelabuhan dan hotel), fasilitas peribadatan (masjid, mushola, gereja), fasilitas pemerintahan (Kantor Bupati, Kantor Camat, Kantor Desa). Tersedianya fasilitas pelayanan yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan lainya menunjukkan bahwa Kecamatan Barru layak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai Ibukota Kabupaten Barru.

Terpusatnya atau terkonsentrasinya fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kecamatan Barru akan

memberikan manfaat dan ketersediaannya akan menarik lebih banyak penduduk, sehingga akan terbentuk pola permukiman yang terpusat pada lokasi-lokasi optimal dari pusat pelayanan.

Kondisi yang berbeda terjadi di Kecamatan Malusetasi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga (25.549 jiwa) di Kabupaten Barru, dengan total jenis fasilitas hanya 9 jenis, terdapat 20 unit jumlah fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Tentunya ini merupakan sebuah tanda masih sangat kurang pelayanan di Kecamatan Malusetasi, oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Barru untuk mendorong pertumbuhan modal distribusi barang dan jasa untuk berbagai aktifitas penduduk dalam pengembangan wilayah tersebut.

Dari analisis skalogram di 7 Kecamatan terjadi penyebaran fasilitas sosial ekonomi yang terkonsentrasi di ibukota Kabupaten (Kecamatan Barru). Pada analisis *skalogram* Ibukota Kecamatan Barru menempati peringkat pertama baik dalam jumlah jenis maupun jumlah unit fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan yang tersedia. Terkonsentrasinya fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan menambah efektifitas fasilitas tersebut karena melayani sejumlah penduduk yang merupakan ambang batas.

Persoalan yang kemudian muncul adalah masih terjadi disparitas dalam struktur tata ruang di wilayah Kabupaten Barru, ketersediaan dan penyebaran fasilitas penunjang ekonomi yaitu hotel, pelabuhan, terminal dan pasar, masih terkonsentrasi di beberapa wilayah potensial yaitu Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten).

Kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan kecil perdesaan menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penduduk di desa-desa sekitarnya. Fasilitas pelayanan yg lengkap akan mendorong konsentrasi permukiman penduduk di sekitar pusat kota, sehingga akan terbentuk pola permukiman yang terpusat pada lokasi-lokasi yang optimal dari pusat pelayanan dan penggunaan fasilitas pelayanan akan lebih efektif. Fungsi kota kecamatan sebagai pusat aktifitas ekonomi dapat dilihat melalui kegiatan pasar yang ada di kecamatan tersebut. Pasar-pasar yang ada masih berfungsi sebagai tempat pemasaran produk dari wilayah lain dan sebagai suatu sarana bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Aktifitas pasar yang terjadi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah pelayanannya.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Barru merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru

dikarenakan berfungsi sebagai penyedia fasilitas sosial, ekonomi dan ekonomi pemerintahan yang dibutuhkan oleh kecamatan-kecamatan di sekitarnya.

2. Analisis Interaksi Antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kecamatan Barru di Kabupaten Barru.

Untuk mengetahui pola interaksi antar wilayah (ibukota Kecamatan) di Kabupaten Barru, maka metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan rumus gravitasi. Rumus gravitasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2}$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara kota/wilayah A dan B

P1 = jumlah penduduk kota/wilayah i (ribuan jiwa)

P2 = jumlah penduduk kota/wilayah j (ribuan jiwa)

d² = jarak antara daerah i dan j (Km) dipangkatkan 2

a. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Tanete Rilau.

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 33.773}{9,27^2} = \frac{16.144.854}{85,93}$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Rilau

P1= jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Tanete Rilau (33.773 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Rilau (9,27 Km) ²

b. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Tanete Riaja

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} = \frac{41.078 \times 22.739}{17,16^2 = 294,47} = 3.172.047$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Riaja

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Tanete Riaja (22.739 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Riaja (17,16 Km) ²

c. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Sopeng Riaja

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} = \frac{41.078 \times 17.899}{16,36^2 = 267,65} = 2.747.076$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Sopeng Riaja

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Sopeng Riaja (17.899 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Sopeng Riaja (16,36 Km) ²

d. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Balusu

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} = \frac{41.078 \times 18.629}{9,39^2 = 88,17} = 8.679.165$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Balusu

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Balusu (18.629 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Balusu (9,39 Km) ²

e. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Malusetasi

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 25.549}{24,61^2} = 1.732.852$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Malusetasi

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Malusetasi (25.549 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Malusetasi (24,61 Km) ²

f. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Pujananting

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 13.100}{21,21^2} = 1.196.198$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Pujananting

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Pujananting (13.100 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Pujananting (21,21 Km) ²

Berdasarkan hasil analisis gravitasi untuk mengetahui nilai interaksi antara ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Barru terhadap Ibukota Kecamatan Barru (Kota Barru), dapat dijabarkan sebagai berikut :

Interaksi tertinggi terjadi antara Kecamatan Barru dengan Kecamatan Tanete Rilau yaitu sebesar 16.144.854 Tingginya interaksi ini terjadi dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang cukup besar dan jarak yang cukup dekat yaitu 9,27 Km. Kuatnya

interaksi ini ditunjang pula dengan ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada, dimana Kecamatan Barru mempunyai fasilitas yang lebih tinggi keberadaanya di banding Kecamatan Tanete Rilau terutama fasilitas pelayanan seperti Pendidikan, bank, terminal dan Pelabuhan. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan *Skalogram* dimana Kecamatan Barru mempunyai skor yang lebih tinggi yaitu Total Nilai Fasilitas (TNF) sebesar 4224 dan merupakan hirarki I sedangkan Kecamatan Tanete Rilau mempunyai Total Nilai Fasilitas (TNF) sebesar 342 dan merupakan hirarki V.

Interaksi yang besar kedua terjadi pada Kecamatan Barru dengan Kecamatan Balusu yaitu sebesar 8.679.165 kuatnya hubungan ini dipengaruhi oleh dekatnya jarak tempuh dari Kecamatan Barru ke Kecamatan Balusu yang hanya 9,39 Km. Kuatnya interaksi yang terjadi antara kedua kecamatan ini didukung pula oleh ketersediaan fasilitas pelayanan, dimana Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu dalam hal Fasilitas pelayanan, ini dibuktikan dengan nilai TNF Kecamatan Balusuyaitu 1.022 dan merupakan hirarki VII dalam struktur tata ruang Kabupaten Barru.

Serta interaksi yang paling rendah terjadi pada Kecamatan Barru dan Kecamatan Pujananting yaitu sebesar 1.196.198. Rendahnya interaksi ini disebabkan karena jarak tempuh kedua

kecamatan tersebut yang sangat jauh yaitu 21,21 Km. Jarak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan ibukota kecamatan. Penduduk di wilayah kecamatan di sekitar Ibukota Kecamatan Barru, akan memilih atau cenderung selektif dalam menentukan arah pergerakan aktifitas ke daerah yang lebih dekat, fasilitas lengkap, biaya transportasi terjangkau dan moda transportasi memadai. Perilaku cenderung selektif dalam menentukan pilihan (*preferensi*) menjadi ciri-ciri masyarakat perkotaan yang moderen dan heterogen. Hal ini terjadi pada penduduk di Ibukota Kecamatan Barru dan penduduk di wilayah sekitarnya (*hinterland*).

Berdasarkan analisis interaksi wilayah dengan rumus gravitasi, dapat disimpulkan bahwa interaksi Kecamatan Barru sangat tinggi dengan kecamatan-kecamatan yang jaraknya lebih dekat, yaitu Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Balusu. Sedangkan interaksi paling rendah terjadi karena faktor jarak yang sangat jauh antara Kecamatan Barru dengan Kecamatan Pujananting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan tentang Analisis Penentuan Kecamatan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Barru merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru dikarenakan berfungsi sebagai penyedia fasilitas sosial, ekonomi dan ekonomi pemerintahan yang dibutuhkan oleh kecamatan-kecamatan di sekitarnya.
2. Interaksi Kecamatan Barru terlihat sangat tinggi dengan kecamatan-kecamatan yang jaraknya lebih dekat, yaitu Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Balusu. Sedangkan interaksi paling rendah terjadi karena faktor jarak yang sangat jauh antara Kecamatan Barru dengan Kecamatan Pujananting.

B. Rekomendasi.

Dari kesimpulan yang dirumuskan diatas, maka dalam rangka mencapai tujuan penelitian, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi salah satu acuan dalam perumusan rencana tata ruang yang komprehensif dan bersinergi antar satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kabupaten Barru, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam upaya mencegah dan mengurangi terjadinya disparitas sosial dan ekonomi, maka peningkatan peran dan fungsi Kecamatan lainnya dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi darat yang menunjang kelancaran kegiatan perekonomian seperti jaringan jalan dan sarana angkutan yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan interaksi atau pergerakan manusia, barang dan jasa antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan sekitarnya sehingga kegiatan perekonomian kecamatan yang bukan sebagai pusat pertumbuhan juga mengalami pertumbuhan.

2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru, sudah semestinya mempertimbangkan struktur tata ruang Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barru sesuai kenyataan yang ada. Tujuannya agar produk perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan optimal sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Arifin, Zainal, 2008. “*Penetapan Kawasan Andalan Dan “Leading Sector” Sebagai Pusat Pertumbuhan Pada Empat Koridor Di Provinsi Jawa Timur*”, Naskah Publikasi Pengembangan IPTEKS, Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arsyad, Lincolin, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka. 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara : Tobelo.
- Kecamatan Tobelo Dalam Angka. 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tobelo : Tobelo.
- Daldjoeni, N., 1997, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ermawati, 2010. “*Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta : Surakarta
- Hafied, Hamzah. 2009. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Kretakupa Print : Makassar.
- Nahrawi, Yusuf M., 2005. “*Identifikasi Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*”, Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang. (tidak dipublikasikan).
- Nehru, Irfin. 2009. *Proposal Riset : Analisis Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Gorontalo*.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara, tahun 2011-2031. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Dinas tata Ruang dan Permukiman.*

Sutikno dan Maryunani, 2007. *“Analisis Potensi Dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang”*, Journal of Indonesian Applied Economics, Volume 1 Nomor 1 hal 1-17.

Zainal Abidin. 2011. *Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hestudiputri, Dita (2007). *Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang*. Skripsi Universitas Negeri Sumatra Utara.

Kamaludindin, Rustian, 1993. *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mahi, La. 2009. *Analisis Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Pada Perwilayahan Pembangunan Di Kabupaten Muna*. (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo : Kendari. Matoka,

Misriatun, 2009. *Analisis Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kolaka Bagian Timur*. (Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana Universitas Haluoleo, tidak dipublikasikan).

Mulyanto, H.R. 2008. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Geraha.

Nas, PJM, 1999. *Kota di Dunia Ketiga*, Jakarta: Bharata.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Taringan, R. 2006, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta PT Bumi Aksara.

Ulfa. 1994. *Studi Jangkauan Pelayanan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Sulawesi Tenggara*. (Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana UNHAS, tidak di publikasikan).

A. Ubaidillah, dkk. 2000. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press : Jakarta.

Alvin S. Jhonson. 2006. *Sosiologi Hukum*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Andi Prastowo. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian*. AR-ruz Media : Yogyakarta.

Abdul Chaer, Leoni Agustina. 2004. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustakaraya : Jakarta.

Bagong Suyanto. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana : Jakarta.

Djoko Widagdho, dkk, 1991. *Ilmu Budaya Dasar*. Bumi Aksara : Jakarta.

Elly M. Dkk. 2008. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Edisi ke 2, Cetke 3. Kencana : Jakarta.

Thomas, Wawancara, desa Suli, Kecamatan Salahutu.

Hj. Najamuddin, wawancara, tempat Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Salahutu.

H. Muhammad Nawawi, Wawancara. tempat kediaman, Desa Liang. Maluku Tengah

H. Lalu Abdumuthalib, Wawancara, Kantor Kecamatan Salahutu. Maluku Tengah.

John Rayes, Wawancara, tempat kediaman, Desa Suli, Kec. Salahutu, Maluku Tengah.

J. Dwi Narko, Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi teks pengantar dan terapan*, cetakan ke II. Kencana : Jakarta.

Jacobus Ranjabar. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia : Bogor.

Kumanto Sunarto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Universitas Indonesia : Jakarta.

Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Universitas Indonesia : Jakarta.

Lexy J. Moeleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakara : Bandung.

M. Bambang Pranowo. 2008. *Sosiologi Sebuah Pengantar, Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*. Labolatoruim Sosiologi Agama : Jakarta.

M. Arifin Hakim. 2001. *Ilmu Sosial Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. Pustaka Satya : Bandung.

Makawaru, Wawancara, tempat kediaman, Desa Benete, Kecamatan Salahutu.

Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Gadjah Madah University Press : Yogyakarta.

Responden, Wawancara, Tempat Pasar Tradisional Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.

Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Grafindo Persada Cet. 38 : Jakarta.

Peter L. Berger. 2009. *Perspektif Metateori Pemikiran*. Pustaka LP3S Indonesia : Jakarta.

William A. Haviland. 1985. *Antropologi*. Erlangga : Surakarta.

Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta.



ANALISIS INTERAKSI ANTAR IBUKOTA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BARRU.

a. Interaksi Wilayah Ibukota Kecamatan Barru Dengan Kecamatan Lainnya Di Kabupaten Barru.

Untuk mengetahui pola interaksi antar wilayah (ibukota Kecamatan) di Kabupaten Barru, maka metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan rumus gravitasi. Rumus gravitasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2}$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara kota/wilayah A dan B

P1 = jumlah penduduk kota/wilayah i (ribuan jiwa)

P2 = jumlah penduduk kota/wilayah j (ribuan jiwa)

d² = jarak antara daerah i dan j (Km) dipangkatkan 2

Rumus Gravitasi disederhanakan menjadi (Daldjoeni dalam Ermawati, 2010:51).

1. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Tanete Rilau.

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 33.773}{9,27^2} = \frac{16.144.854}{85,93}$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Rilau

P1= jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Tanete Rilau (33.773 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Rilau (9,27 Km) ²

2. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Tanete Riaja

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 22.739}{17,16^2} = \frac{3.172.047}{294,47}$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Riaja

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Tanete Riaja (22.739 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Tanete Riaja (17,16 Km) ²

3. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Sopeng Riaja

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 17.899}{16,36^2 = 267,65} = 2.747.076$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Sopeng Riaja

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Sopeng Riaja(17.899 jiwa)

d²= jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Sopeng Riaja(16,36 Km) ²

4. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Balusu

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 18.629}{9,39^2 = 88,17} = 8.679.165$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Balusu

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Balusu (18.629 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Balusu (9,39 Km) ²

5. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Malusetasi

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 25.549}{24,61^2 = 605,65} = 1.732.852$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Malusetasi

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Malusetasi(25.549 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Malusetasi (24,61 Km) ²

6. Interaksi antara Kec. Barru dengan Kec. Pujananting

$$I = \frac{P1 \times P2}{d^2} \quad I = \frac{41.078 \times 13.100}{21,21^2 = 449,86} = 1.196.198$$

Keterangan :

I = besarnya interaksi antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Pujananting

P1 = jumlah penduduk kec. Barru (41.078 jiwa)

P2 = jumlah penduduk kec. Pujananting (13.100 jiwa)

d² = jarak antara ibukota Kec. Barru dan Ibukota Kec. Pujananting (21,21 Km) ²